

**STUDI PREFERENSI PETANI JAGUNG (*Zea mays* L.) TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KELURAHAN
WARUJAYENG, KECAMATAN TANJUNGANOM,
KABUPATEN NGANJUK**

Oleh :

DESTY FATMANURYANTI



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG
2018**

**STUDI PREFERENSI PETANI JAGUNG (*Zea mays* L.) TERHADAP
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KELURAHAN
WARUJAYENG, KECAMATAN TANJUNGANOM,
KABUPATEN NGANJUK**

Oleh :
DESTY FATMANURYANTI

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
MALANG
2018**

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala isi dan pernyataan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Januari 2018

Desty Fatmanuryanti

145040107111003



RINGKASAN

DESTY FATMANURYANTI. 145040107111003. Studi Preferensi Petani Jagung (*Zea mays* L.) terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Dibawah Bimbingan Sujarwo sebagai Pembimbing Utama dan Hendro Prasetyo Sebagai Pembimbing Pendamping.

Kewenangan bidang pertanian di Kabupaten Nganjuk, dipegang oleh Dinas Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk merumuskan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu penulis merumuskan aspek-aspek dalam kebijakan pertanian yang akan digunakan pada penelitian ini didasarkan pada kedua sumber yaitu Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) Menganalisis preferensi petani jagung terhadap masing-masing atribut kebijakan pertanian (2) Merumuskan kombinasi atribut terbaik dari aspek kebijakan pertanian hasil preferensi petani jagung yang lebih diprioritaskan petani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan pada bulan September 2017 – Januari 2018 di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Metode penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus Parel *et al.* (1973). Sesuai dengan perhitungan menggunakan rumus parel, didapatkan hasil jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 orang. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis Konjoin dengan bantuan *software SPSS*.

Hasil penelitian preferensi menggunakan analisis Konjoin menunjukkan bahwa pada Aspek Ekonomi Produksi, atribut yang menjadi prioritas petani adalah atribut Kebijakan Harga Hasil Pertanian dengan nilai utilitas 16,184 dan atribut Pengembangan Penanganan Pasca Panen dengan nilai utilitas 15,523. Hasil Preferensi terhadap Aspek Pasar diperoleh hasil bahwa atribut yang menjadi prioritas petani adalah atribut Kebijakan Tunda Jual dengan nilai utilitas 5,471 dan atribut Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian dengan nilai utilitas 25,822. Hasil preferensi pada Aspek Kemitraan, diperoleh hasil bahwa atribut yang menjadi prioritas petani adalah atribut Temu Usaha dengan Pembeli Hasil Produksi dengan nilai utilitas 11,466. Berdasarkan hasil preferensi menggunakan analisis Konjoin, kombinasi atribut terbaik dari Aspek Kebijakan Pertanian Hasil Preferensi Petani Jagung di kelurahan Warujayeng yaitu atribut Kebijakan Harga Hasil Pertanian, Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian dan Temu Usaha dengan Pembeli Hasil Produksi.

SUMMARY

DESTY FATMANURYANTI. 145040107111003. Preference Study of Maize (*Zea Mays L.*) Farmers Towards The Agricultural Development Policy in Warujayeng Village, Tanjunganom Sub District, Nganjuk District. Under Guidance of Sujarwo as the main lecturer and Hendro Prasetyo as a companion lecturer.

The authority of agriculture in Nganjuk regency, held by the Agriculture Office, so that the Nganjuk District Agriculture Office formulates the Strategic Plan of the Nganjuk District Agricultural Service every five years. Therefore, the authors formulate aspects of agricultural policy that will be used in this study based on both sources, namely the Ministry of Agriculture's Strategic Plan for 2015-2019 and the Nganjuk District Agriculture Service Strategic Plan for 2014-2018. This study has the purpose of (1) Analyze the preferences of maize farmers preference toward each attribute of agricultural policy (2) 2. Formulate the best combination attributes of the agricultural policy aspects of the maize farmers preferences that are more prioritized by farmers.

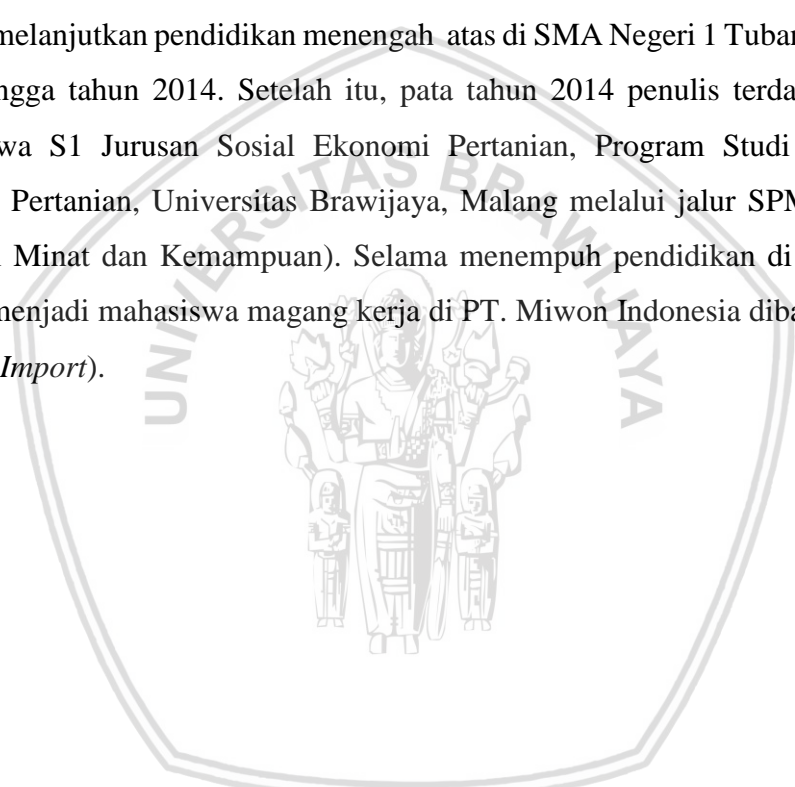
This study uses a quantitative approach and implemented in September 2017 - January 2018 in Warujayeng Village, Tanjunganom District, Nganjuk District. The method of determining the sample using simple random sampling using Parel et al. (1973). In accordance with the calculation using the parallel formula, obtained the results of the number of samples used in this study are as many as 50 people. The analytical method used is using Conjoin analysis with the help of SPSS software.

The results of the research preferences using Conjoin analysis show that in the Production Economics Aspect, the attributes that become the priority of the farmer are attributes of the Agricultural Product Price Policy with a utility value of 16,184 and attributes of the Development of Post-Harvest Handling with a utility value of 15,523. Result of Preference to Market Aspect is obtained result that attribute which become priority of farmer is attribute of Selling Deferment Policy with utility value 5,471 and attribute of Policy of Purchasing of Agricultural Product with utility value 25,822. The result of preference on Aspect of Partnership, obtained the result that attribute which become priority of farmer is attribute of Business Meeting with Agricultural Production Buyers with utility value 11,466. Based on the results of preference using Conjoin analysis, the best combination attribute of the Agricultural Policy A iii the maize farmer Preference Results in Warujayeng village is the attribute of the Agricultural Product Price Policy, the Policy of Agricultural Product Purchase and Business Meeting with Agricultural Production Buyers.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Tuban pada tanggal 02 Desember 1995. Penulis merupakan puteri pertama dari dua bersaudara dari keluarga Bapak Bambang Iriantono dan Ibu Retna Eka Yuliarti.

Penulis menempuh pendidikan formal pada tahun 2000 hingga tahun 2002 di TK Pertiwi Tuban, kemudian pada tahun 2002 hingga tahun 2008 menempuh pendidikan dasar di SDN Kutorejo 1 Tuban. Pada tahun 2008 hingga tahun 2011, penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Tuban. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tuban pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Setelah itu, pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang melalui jalur SPMK (Seleksi Program Minat dan Kemampuan). Selama menempuh pendidikan di S1, penulis pernah menjadi mahasiswa magang kerja di PT. Miwon Indonesia dibagian EXIM (*Export-Import*).



Lembar Persembahan

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Mya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ♥ Kedua orangtuaku ayah dan ibu dan keluargaku yang sangat kusayangi dan cintai yangt selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi.
- ♥ Dosen pembimbing skripsi bapak Sujarwo dan bapak Hendro Prasetyo yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
- ♥ Dosen penguji skripsi Bapak Andrean Eka Hardana yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
- ♥ Sahabat-sahabatku dimasa perkuliahan Vivi, Moi, Nindy, Lala, Anggie, Prinka, Ratih, Ilma, Ina, Lisa, Hana', Inas, Meidi dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak karena telah memberikan warna-warni kehidupan kampus yang sangat menyenangkan. Banyak pengalaman, pelajaran dan kenangan yang baru telah kualami bersama kalian.

KATA PENGANTAR

Penulis menPuji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Studi Tentang Preferensi Petani Jagung (Zea mays L.) Terhadap Kebijakan Pertanian Di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk”* dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian Strata 1 (S-1). Penulis meneliti tentang Preferensi petani terkait dengan kebijakan-kebijakan pertanian yang terdiri dari Aspek ekonomi produksi, Aspek pasar, dan Aspek kemitraan menggunakan analisis Konjoin, untuk mendapatkan hasil kombinasi atribut terbaik dari masing-masing aspek kebijakan pertanian.

Preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen (individu) yang didasari oleh 2 hal, yaitu pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun. Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya, begitu juga petani. Pada penelitian ini membahas tentang preferensi petani terhadap kebijakan pembangunan pertanian, sehingga manfaat dari adanya preferensi petani yaitu dapat mengetahui pilihan kebijakan yang menjadi prioritas petani sesuai dengan pengalaman dan kepercayaannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada bapak Sujarwo dan Hendro Prasetyo, M,Si selaku Dosen Pembimbing dan bapak Andrean Eka Hardana selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan atas penyusunan skripsi ini, Orang tua dan adik penulis yang telah memberikan semangat melalui dukungan dan Do’a dan juga teman-teman bimbingan Bapak Sujarwo dan Hendro Prasetyo yang telah memberikan saran, semangat dan dukungan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, Agustus 2018

Penulis

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya. Simamora (2004) mengungkapkan bahwa preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen (individu) yang didasari oleh 2 hal, yaitu pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun. Contoh preferensi pada bidang sekolah yaitu terkait pengalaman yang diperoleh akan lebih dirasakan oleh orang tua. Sehingga orang tua tentu memiliki pemikiran yang cukup besar dalam menentukan sekolah yang tepat untuk anaknya, dan untuk kepercayaan turun temurun lebih dikaitkan dengan keluarga dan lingkungan yang ada disekitar peserta didik.

Komponen preferensi dipengaruhi oleh nilai, sikap serta persepsi. Artinya kecenderungan akan ada setelah individu memiliki persepsi sendiri, nilai dan juga sikap terhadap objek yang akan dipilihnya. Preferensi sendiri akan mempengaruhi bagaimana kepuasan dari objek yang telah dipilih nantinya. Selain itu preferensi juga dipengaruhi faktor lainnya yaitu motivasi atau dorongan dari lingkungan sekitar. Motivasi berasal dari kata Latin *movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. Maryati (2009), mendefinisikan motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan. Sedangkan motivasi diri menurut adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapat kepuasan atas perbuatan tersebut. Preferensi petani merupakan suatu pilihan yang diambil petani dari berbagai pilihan yang ada. Suatu preferensi petani dibutuhkan dalam suatu perumusan kebijakan pertanian untuk memperoleh kebijakan pertanian yang pro petani dan dapat berjalan dengan sukses.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan dapat meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan petani, sehingga untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah baik di pusat maupun di daerah

mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan lain-lain. Campur tangan pemerintah dibidang pertanian disebut sebagai “politik pertanian” (*agricultural policy*) atau “kebijakan pertanian”.

Kebijakan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkadang tidak dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaiannya kebijakan yang berlaku dengan kondisi di setiap daerah, selain itu kebijakan yang ada, yaitu berupa bantuan banyak yang tidak tepat sasaran sehingga petani yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut kehilangan haknya. Hal tersebut juga terjadi di salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain masalah tersebut, kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani jagung.

Petani Jagung membutuhkan kebijakan didalam aspek pasar dan bantuan alat pengolahan pasca panen untuk meningkatkan pendapatannya, tetapi petani jagung malah mendapatkan bantuan berupa benih dan pupuk yang tidak dibutuhkan petani karena kedua input pertanian tersebut sangat mudah didapatkan oleh petani. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu dengan memberi kepercayaan kepada petani untuk memberikan tingkat preferensi terhadap kebijakan pertanian yang ada, sehingga nantinya pemerintah daerah dapat memperhitungkan hasil preferensi tersebut yang dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Hasil analisis akan menghasilkan preferensi dan prioritas petani dalam memilih atribut pada aspek pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Preferensi petani merupakan suatu pilihan yang telah dipilih petani dari suatu pilihan yang ada. Pilihan petani tersebut terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dialami. Pilihan yang diambil petani didasarkan oleh masing-masing atribut pilihan yang paling diprioritaskan oleh seorang petani. Pengambilan keputusan petani tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengalaman petani, tingkat kedalaman informasi yang didapat oleh petani, dan juga manfaat yang akan diperoleh oleh petani. Preferensi petani dibutuhkan dalam suatu

perumusan kebijakan pertanian untuk memperoleh kebijakan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Penelitian mengenai preferensi petani terhadap kebijakan pertanian telah dilakukan sebelumnya oleh Orazem *et al.*, (1988) tentang analisis kebijakan data pendapat petani Iowa mengenai empat kebijakan pertanian: melanjutkan program saat ini yang menargetkan manfaat bagi petani secara fiskal, kontrol areal wajib, dan beralih ke pasar bebas. Namun pada penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu penelitian hanya untuk menganalisis pendapat petani tentang kebijakan agribisnis, sehingga masih belum ada keterlibatan petani dalam penyusunan suatu kebijakan pertanian. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wagayehu Bekele (2007) menunjukkan bahwa bahwa analisis login multinomial preferensi petani untuk intervensi pembangunan dibagi menjadi empat kategori utama: pasar, irigasi, pemukiman kembali, dan konservasi tanah dan air, namun kekurangannya pada penelitian tersebut belum bisa melihat secara spesifik apa yang menjadi prioritas petani terhadap suatu kebijakan. Pada penelitian preferensi terhadap atribut terbaik sebelumnya telah dilakukan oleh Ernita (2017) dengan hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi terbaik dalam pilihan atribut didapatkan hasil yaitu puree bayam organik dengan rasa melon dan kemasan cup. Namun pada penelitian tersebut masih belum bisa menjelaskan preferensi secara keseluruhan terhadap atribut produk yang diteliti.

Pada masa ini, untuk mewujudkan Pembangunan Jangka Panjang Nasional pemerintah melalui Kementrian Pertanian merancang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Rencana Strategis atau Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Pada Rencana Strategis tersebut aspek kebijakan pembangunan pertanian yang dibahas yaitu berupa aspek teknis produksi, aspek ekonomi produksi, aspek kelembagaan petani, aspek pasar, aspek kemitraan, dan aspek lingkungan.

Kewenangan bidang pertanian di Kabupaten Nganjuk dipegang oleh Dinas Pertanian, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk merumuskan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu penulis merumuskan aspek-aspek dalam kebijakan pertanian yang akan digunakan pada penelitian ini didasarkan pada kedua sumber yaitu Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018 (Dinas Pertanian Nganjuk, 2014).

Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan sawah terbesar di Nganjuk, dan penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani aktif (Nganjuk Dalam Angka, 2010). Petani di daerah ini sebagian besar adalah petani yang pada musim tanam pertama dan kedua menanam padi, dan pada musim tanam ketiga menanam jagung. Namun karena harga yang diterima petani rendah dan kurangnya pasar pada komoditas tersebut, banyak petani yang memilih untuk mengganti tanaman budidayanya pada musim tanam ketiga yang semula jagung menjadi padi, sehingga, jumlah produksi jagung di daerah ini menjadi menurun. Untuk mendukung dan membantu meningkatkan jumlah produksi jagung yang diproduksi petani diperlukan pembaharuan kebijakan pertanian oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana preferensi petani terhadap atribut-atribut dari kebijakan pertanian pada komoditas jagung di salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan analisis konjoin, dimana penelitian ini masih belum pernah diteliti oleh peneliti lain, karena menggunakan konsep teori preferensi yang berbeda dengan teori preferensi konsumen yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian dapat mengetahui aspek kebijakan yang paling diminati dan dibutuhkan oleh petani di daerah ini.

Penyusunan suatu kebijakan sejak awal harus melibatkan peran serta masyarakat secara bersama-sama menentukan arah kebijakan (model *bottom-up*), sehingga melahirkan suatu kebijakan yang adil dan demokratis. Pembuat kebijakan yang demokratis menawarkan dan menjunjung tinggi pentingnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Melalui cara partisipatif seperti itu akan melahirkan suatu keputusan bersama yang adil dari

pemerintah untuk rakyatnya, sehingga akan mendorong munculnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan (Erman,2012).

Menurut Munadi (2008), masyarakat adalah stakeholder kebijakan publik di daerah disamping pemerintah daerah dan DPRD. Partisipasi masyarakat juga dianggap penting dalam pembuatan kebijakan, karena warga masyarakatlah yang paling tahu dan merasakan kenyataan dan kebutuhannya. Ini merupakan dasar sosiologis yang penting bagi penyusunan suatu kebijakan di samping dasar yuridis dan filosofis. Oleh karena itu penulis menyusun aspek-aspek kebijakan pertanian dan juga atribut kebijakan pertanian sehingga penulis dapat meneliti bagaimana preferensi petani (sebagai *stakeholder*) terhadap atribut-atribut dari kebijakan pertanian pada komoditas jagung di salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk merumuskan kombinasi atribut kebijakan pertanian yang lebih dipilih petani di daerah tersebut. Penelitian Preferensi petani tersebut dilihat dari pilihan dari masing-masing atribut aspek Kebijakan Pembangunan Pertanian, sehingga dari adanya pilihan tersebut petani dapat memilih atribut kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan petani. Penelitian ini juga dapat menjadikan masyarakat (petani) dapat berperan aktif dalam penyusunan suatu kebijakan di suatu daerah dan juga hasil dari preferensi ini dapat dijadikan referensi untuk adanya kebijakan pertanian dimasa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana preferensi petani jagung terhadap masing-masing atribut kebijakan pertanian ?
2. Apa saja kombinasi atribut dari aspek kebijakan pertanian hasil preferensi petani jagung yang lebih diprioritaskan petani ?

1.3 Batasan Masalah

Berikut batasan masalah dalam penelitian :

Preferensi petani terkait dengan kebijakan-kebijakan pertanian pada penelitian ini terdiri dari aspek ekonomi produksi, aspek pasar, dan aspek kemitraan yang didapatkan dari kombinasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2014-

2018 dan disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi petani jagung di kelurahan Warujayeng.

1.4 Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis preferensi petani jagung terhadap masing-masing atribut kebijakan pertanian
2. Merumuskan kombinasi atribut terbaik dari masing-masing aspek kebijakan pertanian hasil preferensi petani jagung yang lebih diprioritaskan petani.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana mengaplikasikan teori yang telah dipelajari sehingga dapat dibandingkan dengan keadaan sebenarnya dilapang serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pertanian.

2. Bagi petani jagung di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terkait usahatani Jagung yang telah dikelola, dan dapat mengutarakan preferensi dari atribut kebijakan pertanian sesuai dengan daerahnya.
3. Bagi pemerintah terutama pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menyusun kebijakan terkait sektor pertanian, khususnya tanaman pangan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian, tambahan informasi, wawasan pengetahuan dan referensi atau studi pembandingan untuk permasalahan yang sama untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk memastikan ruang lingkup serta pembahasan dalam penelitian tidak terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan digunakan untuk memberikan gambaran kepada penulis mengenai hasil dari penelitian serta dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mencermati permasalahan yang diangkat baik dikaji secara empiris maupun teoritis sehingga diperoleh pendekatan yang sesuai. Penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam mencermati masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

Pada penelitian Orazem *et al.*, (1988) tentang analisis kebijakan data pendapat petani Iowa mengenai empat kebijakan pertanian: melanjutkan program saat ini yang menargetkan manfaat bagi petani secara fiskal, kontrol areal wajib, dan beralih ke pasar bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendapat petani tentang kebijakan agribisnis. Metode yang digunakan yaitu dengan model pendekatan probit. Hasil penelitian ini setelah didapatkan data pendapat petani Iowa mengenai empat kebijakan pertanian: melanjutkan program saat ini yang menargetkan manfaat bagi petani secara fiskal, kontrol areal wajib, dan beralih ke pasar bebas. Hasilnya menunjukkan bahwa situasi keuangan petani, ukuran dan jenis operasi, pendidikan, dan pengalaman petani secara signifikan mempengaruhi pendapatnya. Sikap terhadap kontrol dan penargetan wajib sangat sensitif, dan sikap terhadap kelanjutan program saat ini paling tidak peka terhadap perubahan karakteristik ekonomi. Sedangkan pada penelitian Wagayehu Bekele (2007) yang memiliki tujuan untuk lebih memahami peringkat subyektif pertanian dari masalah pertanian dan preferensi terhadap intervensi pembangunan dan penelitian ini menggunakan metode survei preferensi, model logit dan model regresi multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa analisis login multinomial preferensi petani untuk intervensi pembangunan dibagi menjadi empat kategori utama: pasar,

irigasi, pemukiman kembali, dan konservasi tanah dan air. Pengakuan dan pemahaman akan faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi penerimaan akseptabilitas, peringkat subyektif, diskriminasi subyektif. Kebijakan pembangunan untuk penerapan tingkat mikro, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perumusan kebijakan tingkat makro.

Pada penelitian Ernita, (2017) tentang Preferensi Konsumen dan Strategi Pemasaran *Puree* Bayam Organik (Studi Kasus: CV. Addin Abadi Bogor)., tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis preferensi konsumen pada produk *puree* bayam organik, serta memformulasikan kombinasi atribut terbaik pilihan konsumen *Puree* Bayam Organik. Pada penelitian ini analisis yang dilakukan meliputi analisis deskriptif, analisis konjoin untuk mengetahui preferensi, serta analisis hirarki proses untuk memformulasikan strategi pemasaran yang tepat bagi produk baru *puree* bayam organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 96 responden dari 100 orang keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel mengaku tertarik pada produk baru tersebut. Hasil analisis preferensi konsumen menggunakan *conjoin* analisis menunjukkan bahwa atribut kemasan merupakan atribut yang paling dipentingkan bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Sedangkan untuk kombinasi terbaik dalam pilihan atribut didapatkan hasil yaitu *puree* bayam organik dengan rasa melon dan kemasan cup.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang preferensi petani terhadap kebijakan pertanian di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu belum ada penelitian yang mengkaji tentang preferensi petani jagung terhadap kebijakan pertanian dengan menggunakan analisis konjoin. Terdapat *gap* penelitian dalam penelitian ini, yaitu *practical gap* yaitu dengan menggunakan analisis konjoin dan *situational gap* yaitu adanya perbedaan penelitian yang berdasarkan adanya perbedaan waktu dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini belum ada pada penelitian sebelumnya, yaitu di kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, kabupaten Nganjuk.

2.2 Tinjauan Teori Tentang Ekonomi Pembangunan

2.2.1 Definisi Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi menduduki peran yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama setelah perang dunia ke dua. Berkaitan dengan

perhatian di bidang ekonomi, berkembang disiplin ilmu yang merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas pembangunan ekonomi tersebut adalah Ilmu Ekonomi Pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara atau metode penyelesaian dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, agar pembangunan ekonomi menjadi lebih cepat dan harmonis. Dalam ilmu ekonomi, analisis dan metode pembangunan berkaitan atau menyangkut dengan aspek-aspek di luar bidang ekonomi, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan ekonomi, kependudukan dan masalah pendidikan, sosial, budaya, politik, serta lingkungan (Arsyad, 2010).

2.2.2 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. (Sadono Sukirno, 2002).

2.2.3 Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi,

penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang. (Sadono Sukirno, 2002).

2.2.4 Definisi Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008). Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan (Endang, 2010).

Menurut A.T Mosher (1965) ada 5 syarat yang harus ada (syarat mutlak) untuk adanya pembangunan pertanian. tetapi statis. Syarat-syarat mutlak tersebut yaitu :

a. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.

Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani adalah mutlak. Apabila pasar hasil pertanian tidak ada, produk akan cenderung dikonsumsi sendiri, hal ini tidak akan membangun pertanian sama sekali. Pasar bagi hasil-hasil tani diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan merangsang pertumbuhan pertanian Indonesia. Pasar bagi hasil usaha tani selain berfungsi sebagai penampung hasil tani juga dapat berfungsi sebagai tempat komunikasi. Komunikasi yang dimaksud yaitu mengeratkan kembali hubungan diantara petani. Adanya pasar, maka akan sering terjadi pertemuan dan interaksi antar petani, sehingga apabila salah satu petani

menemui kesulitan, mereka dapat meminta bantuan kepada teman-teman di pasar tersebut. Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi hasil-hasil usaha tani. Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan para petani sewaktu memproduksi.

Diperlukan tiga hal dalam pemasaran hasil usaha tani (A.T Mosher, 1965), yaitu :

- 1) Seseorang disuatu tempat yang membeli hasil usaha tani, perlu ada permintaan (demand) terhadap hasil usaha tani ini.
 - 2) Seseorang yang menjadi penyalur dalam penjualan hasil usaha tani atau sistem tataniaga.
 - 3) Kepercayaan petani pada kelancaran sistem tataniaga itu.
- b. Teknologi yang senantiasa berkembang.

Teknologi dalam pertanian adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan dan menghasilkan output yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa pembangunan pertanian tanpa teknologi ialah hal yang mustahil, karena keduanya berjalan secara beriringan, saling mengikat. Pembangunan pertanian tentu akan sangat berbeda hasil usahataniannya apabila petani tersebut mengadopsi teknologi dibandingkan memakai cara tradisional. Teknologi akan dapat membantu petani meraih hasil secara maksimal dengan kerja yang relatif lebih ringan, tetapi dalam hal ini diperlukan pula biaya yang tidak sedikit. Hal inilah yang biasanya menjadi penghambat utama dalam pengadopsian teknologi pertanian di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan bantuan pemerintah untuk memudahkan petani mengakses teknologi. Kesadaran petani akan pentingnya teknologi pun harus ditingkatkan. Sehingga teknologi dapat membantu petani secara maksimal, dapat dibayangkan apabila petani memiliki teknologi tersebut tetapi ia tidak dapat memakainya.

Teknologi yang diadopsi oleh petani dapat bersumber dari tiga hal berikut ini, yaitu:

- 1) Teknik kerja petani lain,
- 2) Mendatangkan dari daerah lain, dan
- 3) Melakukan percobaan terarah.

c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.

Berkaitan dengan teknologi pertanian yang saat ini lebih banyak ditemukan oleh pihak luar negeri, sehingga masyarakat yang berlokasi jauh dari kota besar sulit untuk mendapatkan teknologi tersebut. Adanya saprotan lokal akan sangat membantu petani dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Tentu saja hal ini akan berakibat sangat baik bagi petani untuk dapat meningkatkan produksinya. Saprotan lokal akan lebih baik apabila berasal dari desa itu sendiri, karena saprotan tersebut sudah sangat paham dengan kondisi petani di daerahnya sehingga ia akan lebih mentolerir harga dibanding dengan saprotan di kota besar yang kebanyakan tak acuh kepada petani. Berbeda dengan saprotan lokal yang ingin membantu warganya.

Terdapat lima sifat yang sarana produksi yang diinginkan oleh petani, yaitu:

- 1) Efektif dari segi teknis
 - 2) Mutunya dapat dipercaya
 - 3) Harganya tidak mahal
 - 4) Harus tersedia pada saat dibutuhkan
 - 5) Harus dijual dalam ukuran/takaran yang cocok
- d. Adanya perangsang produksi bagi petani.

Faktor perangsang utama yang membuat petani semangat untuk meningkatkan produksinya adalah yang bersifat ekonomis. Faktor tersebut antara lain adalah harga hasil produksi pertanian yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, serta tersedianya barang-barang dan jasa yang ingin dibeli oleh para petani untuk keluarganya. Peran pemerintah sangat vital, dalam hal ini, mereka harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif sehingga hal ini dapat berjalan dengan baik. Misalnya kebijaksanaan harga beras minimum, subsidi harga pupuk, kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang intensif, perlombaan-perlombaan dengan hadiah menarik pada petani-petani teladan dan lain-lain. Pendidikan pembangunan pada petani-petani di desa, baik mengenai teknik-teknik baru dalam pertanian maupun mengenai keterampilan-keterampilan lainnya juga sangat membantu menciptakan iklim yang menggiatkan usaha pembangunan.

Jadi perangsang yang dapat secara efektif mendorong petani untuk menaikkan produksinya adalah terutama bersifat ekonomis (A.T Mosher, 1965), yaitu :

- 1) Perbandingan harga yang menguntungkan.
- 2) Bagi hasil yang wajar.
- 3) Tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya.
- e. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan berkelanjutan.

Tanpa pengangkutan yang efisien dan murah, keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat berjalan secara efektif, karena produksi pertanian harus tersebar luas. Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa bahan-bahan perlengkapan produksi ke tiap usaha tani dan membawa hasil usaha tani ke konsumen di kota-kota besar dan kecil. Tanpa alat transportasi mustahil pembangunan dapat dilakukan. Karena transportasi ialah akses untuk memasarkan hasil pertanian dari desa ke masyarakat luas di Indonesia. Pada umumnya jalur transportasi di Indonesia sudah cukup baik, hanya saja terdapat ketidakmerataan pembangunan dimana desa-desa kecil masih sulit dijangkau.

Pada dasarnya transportasi yang diperlukan oleh petani ialah hanya alat pengangkut hal-hal yang berhubungan dengan pertanian, seperti bibit, pupuk, pestisida dll. Alat ini dapat berupa truk sederhana atau mobil *pick-up* biasa, mereka tidak memerlukan sedan ataupun mobil mewah lainnya. Mereka membutuhkan kendaraan yang dapat “dipaksa” bekerja. Terutama yang berbahan bakar hemat, karena kita tahu saat ini harga bahan bakar sangat melambung jauh. Sehingga apabila kendaraan tersebut boros maka hampir dapat dipastikan petani akan enggan memakainya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi biaya angkutan (A.T. Mosher, 1965) antara lain :

- 1) Sifat barang yang harus diangkut, berapa berat atau besarnya barang.
- 2) Jarak pengangkutan barang-barang itu
- 3) Banyaknya barang yang diangkut
- 4) Jenis alat perangkutan

Menurut Mosher (1965), disamping ke lima syarat mutlak tersebut ada lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan) benar-benar akan sangat memperlancar pembangunan pertanian. Yang termasuk syarat-syarat atau sarana pelancar yaitu :

- a) Pendidikan Pembangunan.

Pendidikan pembangunan di sini dititik beratkan pada pendidikan non formal yaitu berupa kursus-kursus, latihan-latihan, dan penyuluhan-penyuluhan. Pendidikan pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas petani.

b) Kredit Produksi.

Petani harus lebih banyak mengeluarkan uang yang digunakan untuk membeli pupuk, bibit unggul, obat-obatan, dan alat-alat lainnya untuk meningkatkan produksi. Pengeluaran ini harus dibiayai oleh tabungan atau dengan meminjam. Oleh karena itu, lembaga-lembaga prekreditasi yang memberikan kredit produksi kepada para petani merupakan suatu factor pelancar yang penting bagi pembangunan pertanian.

c) Kegiatan gotong royong petani.

Kegiatan gotong royong biasanya digunakan secara berkelompok dan bersifat informal.

d) Perbaikan dan perluasan tanah pertanian.

Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian yaitu: pertama, memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam. Kedua, mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah baru.

e) Perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan pemerintah mengenai tiap kebijakan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu.

2.2.5 Peranan Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan ini menyebabkan bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Sektor pertanian di Indonesia mempunyai keunggulan komperatif hal itu disebabkan oleh karena:

1. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa sehingga perbedaan musim menjadi jelas dan periodenya lebih lama.
2. Lokasi Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa sehingga tanaman cukup memperoleh sinar matahari untuk keperluan fotosintesisnya.
3. Curah hujan umumnya cukup memadai.
4. Adanya politik pemerintah yang sedemikian rupa sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor pertanian (Soekartawi, 2003).

Memandang pentingnya dan besarnya peranan yang dapat diambil, maka pertanian maka pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sektor pertanian tersebut dengan cara:

- a. Mengembangkan hasil pertanian.
- b. Mengembangkan pangsa pasar dari hasil pertanian.
- c. Mengembangkan faktor produksi pertanian.

Peranan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi terletak pada :

- 1) Menyediakan surplus pangan yang semakin besar pada penduduk yang semakin meningkat.
- 2) Meningkatkan permintaan akan produk industri, dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan sektor tersier.
- 3) Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian secara terus menerus.
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat untuk dimobilisasi pemerintah.
- 5) Memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Jhingan, 2012).

Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut:

- a) Dengan mensuplai makanan pokok dan bahan baku bagi sektor lain dalam ekonomi yang berkembang
- b) Dengan menyediakan surplus yang dapat diinvestasikan dari tabungan dan pajak untuk mendukung investasi pada sektor lain yang berkembang

- c) Dengan membeli barang konsumsi dari sektor lain, sehingga akan meningkatkan permintaan dari penduduk perdesaan untuk produk dari sektor yang berkembang
- d) Dengan menghapuskan kendala devisa melalui penerimaan devisa dengan ekspor atau dengan menabung devisa melalui substitusi impor (Meier, 1995).

Beberapa pertimbangan tentang pentingnya akselerasi sektor pertanian di Indonesia yaitu:

- (1) Sektor pertanian masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja, sehingga akselerasi pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran.
- (2) Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian desa dimana sebagian besar penduduk berada. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan pertanian paling tepat untuk mendorong perekonomian desa dalam rangka meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia dan sekaligus pengentasan kemiskinan.
- (3) Sektor pertanian sebagai penghasil makanan pokok penduduk, sehingga dengan akselerasi pembangunan pertanian maka penyediaan pangan dapat terjamin. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pangan pada pasar dunia.
- (4) Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga konsumen, sehingga dinamikanya amat berpengaruh terhadap laju inflasi. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan pertanian akan membantu menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
- (5) Akselerasi pembangunan pertanian sangatlah penting dalam rangka mendorong ekspor dan mengurangi impor produk pertanian, sehingga dalam hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
- (6) Akselerasi pembangunan pertanian mampu meningkatkan kinerja sektor industri. Hal ini karena terdapat keterkaitan yang erat antara sektor pertanian dengan sektor industri yang meliputi keterkaitan produk, konsumsi dan investasi (Simatupang, 1997).

2.2.6 Kaitan Antara Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara terus-menerus dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2002). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pada umumnya pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu:

1. Suatu proses yang berarti perubahan secara terus-menerus.
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi tersebut dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan mempunyai hubungan antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dari satu tahap pembangunan ketahap berikutnya. Peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Proses pembangunan dapat menjadi wujud yang nyata, haruslah berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga dapat dilihat suatu pembangunan ekonomi kearah positif, akan tetapi dalam prakteknya ada negara yang melihat laju pembangunan ekonominya dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto, jika cara ini digunakan ada beberapa hal yang tidak diperhatikan, misalnya pertambahan kegiatan ekonomi masyarakat, pertambahan penduduk, sehingga oleh para ahli ekonomi membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi - potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian. Sehingga apabila potensi daerah di bidang pertanian dapat dikembangkan dan ditingkatkan maka pembangunan daerah juga dapat meningkat (Etika, 2013).

2.2.7 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi tersebut mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan pertanian. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan akan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya (Subandi, 2012).

2.3 Tinjauan Teori Tentang Kebijakan Pembangunan Pertanian

2.3.1 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Kebijakan publik didefinisikan sebagai *whatever government choose to do or not to do* (pilihan pemerintah untuk bertindak

atau tidak bertindak). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 2005).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah aturan/kegiatan/program yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan tersebut mempunyai arah atau pola kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan lingkungannya.

2.3.2 Kebijakan Pembangunan Pertanian

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-langkah kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah langkah kebijakan yang harus diambil tersebut meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimatra Pembangunan Pertanian yaitu kebijakan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu, di samping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan di mana kegiatan pertanian berlangsung. Pembinaan terhadap petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil pertanian diarahkan berfungsi sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan, bahan ekspor dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian bertujuan dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah (Soekartawi, 2003).

Kebijakan pembangunan pertanian adalah keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong, mengendalikan, dan mengatur pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan pertanian haruslah dipandang dalam konteks pembangunan nasional yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan saja tetapi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, kebijakan pembangunan pertanian termasuk dalam kategori kebijakan publik, dilakukan oleh pemerintah dan berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak (Simatupang *et al.*, 2003).

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan mempunyai tujuan inti seperti yang dikemukakan oleh Todaro (2004), tiga tujuan inti pembangunan adalah:

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi pangan, sandang, papan, kesehatan, dll;
- b. Peningkatan standar hidup termasuk pendapatan yang lebih tinggi, lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, dan sebagainya;
- c. Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa.

Pembangunan pertanian merupakan peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian serta berkurangnya ketergantungan impor, meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, serta meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sasaran akhir pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat pertanian umumnya, yang tercermin dari meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya produktivitas tenaga kerja pertanian, berkurangnya jumlah penduduk miskin, berkurangnya jumlah penduduk yang kekurangan pangan dan turunnya ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Instrumen Kebijakan Pertanian meliputi berbagai kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, memperbaiki pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan masyarakat pertanian (Todaro, 2004).

Instrumen kebijakan pertumbuhan sektor pertanian meliputi kebijakan-kebijakan sektor pertanian pada:

- 1) subsistem input produksi,
- 2) subsistem produksi,

- 3) subsistem pemasaran output (*domestic* dan perdagangan internasional), dan (d) subsistem pengolahan output/ pasca panen.

Beberapa macam kebijakan pembangunan pertanian diantaranya adalah:

- a) Kebijakan dalam aspek produksi
- b) Kebijakan perbaikan teknologi
- c) Kebijakan harga
 - *Support price* (subsidi harga)
 - Kebijakan harga dasar (*floor price*) dan kebijakan harga atap (*ceiling price*) untuk komoditas padi
- d) Kebijakan subsidi input
 - Kebijakan subsidi pupuk
 - Kebijakan subsidi pembangunan jaringan irigasi
- e) Kebijakan kredit pertanian
- f) Kebijakan perdagangan internasional
- g) Kebijakan kelembagaan

2.3.3 Keterlibatan Petani dalam Kebijakan Pertanian

Menurut Peraturan Menteri Pertanian RI No. 273/Kpts/OT.160/4/2007, Dalam bidang pertanian, keterlibatan petani dalam program pemerintah salah satunya yaitu berupa penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Program utama pembangunan pertanian yaitu: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. Untuk mewujudkan program ketahanan pangan tersebut, khususnya penyediaan pangan, perlu disusun rencana/sasaran setiap tahun. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian melalui musyawarah menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) yang merupakan rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

RDK dijabarkan lebih lanjut oleh kelompok tani dalam suatu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani. Pesanan berupa RDKK yang disusun

melalui musyawarah anggota Kelompok tani hendaknya disampaikan kepada Gabungan kelompok tani, Perusahaan Mitra (distributor pupuk dan benih) serta Perbankan (khusus untuk keperluan kredit) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam, sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran. Oleh karena itu penyusunan RDKK yang dilaksanakan oleh kelompok tani secara serentak dan tepat waktu merupakan kegiatan strategis, sehingga perlu suatu gerakan untuk mendorong petani/kelompok tani menyusun RDKK. Mekanisme penyusunan RDKK harus memperhatikan keinginan para petani, namun mengingat kemampuan petani dalam menyusun perencanaan masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing petani/kelompok dalam menyusunnya, sehingga rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dalam menjalankan kegiatan usahatani.

Tujuan penyusunan RDK dan RDKK yaitu untuk meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok; Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok. Dan juga hasil dari penyusunan RDK dan RDKK ini dapat digunakan pemerintah maupun pemerintah daerah untuk memantau dan melihat perkembangan pertanian didalam tiap kelompok tani dan juga melihat permasalahan yang dihadapi petani. Hasil penyusunan dari RDK dan RDKK secara tidak langsung juga dapat digunakan sebagai acuan dari penyusunan suatu kebijakan di bidang pertanian. Namun di beberapa daerah tertentu penyusunan RDK dan RDKK tidak dilakukan secara aktif, sehingga pemerintah daerah tidak dapat memantau lebih lanjut terkait permasalahan/kendala dan juga perkembangan petani di daerah tersebut.

2.3.4 Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Pembangunan yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan

persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Pembangunan pertanian ke depannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. (Kementan, 2015).

2.3.5 Rencana Strategis Dinas Pertanian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian Rencana Strategis Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Fungsi Dinas Pertanian Daerah yaitu : (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian; (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian ; (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian ; (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu Dinas Pertanian Daerah mempunyai tugas

merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk merumuskan dan menetapkan Kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan, yaitu : (1) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan ; (2) Mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dan pendekatan konsep pengembangan agribisnis ; (3) Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui fasilitasi penyediaan saprodi kepada petani, penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian ; (4) Mengembangkan kluster-kluster agribisnis dan agroindustri pada kawasan terpadu agropolitan dan agrowisata ; (5) Meningkatkan kapasitas manajerial petani dan pelaku usaha ; (6) Meningkatkan upaya Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian. (7) Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi ; (8) Meningkatkan efektifitas dan efisensi pemasaran komoditas pertanian ; (9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian. (Dinas Pertanian Kab.Nganjuk, 2014)

2.4 Tinjauan Aspek Kebijakan Pertanian

Aspek kebijakan pertanian yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Aspek Ekonomi Produksi

Semaoen (1999) mengemukakan bahwa aspek ekonomi produksi pertanian menyajikan analisis tentang cara-cara dan mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh produsen individual dalam menyesuaikan diri terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi. Usaha pertanian terdiri dari banyak usahatani dengan variasi dari yang kecil sampai besar. Secara keseluruhan produsen pertanian dianggap sangat kecil bila dibandingkan dengan pertanian secara keseluruhan. Menurut Ir. AG Kartasapoetra (2014), tujuan ekonomi produksi pertanian yaitu: (1) Ekonomi produksi pertanian menentukan persyaratan-persyaratan bagi pendayagunaan tanah, tanaman, modal kerja dan manajemen dalam pelaksanaan usaha tani secara optimal, (2) Ekonomi produksi pertanian menentukan syarat-syarat agar penggunaan sumber yang tersedia tidak mubadzir atau berada dalam penyimpangan-penyimpangan, (3) Ekonomi produksi pertanian menganalisa kemampuan- kemampuan pola produksi

dalam penggunaannya dengan sumber-sumber yang tersedia daripadanya ditunjukkan pola-pola yang baik yang dapat mencapai optimum, (4) Ekonomi produksi pertanian mengemukakan secara gamblang tentang metode dan sarana pendukung yang sebaiknya digunakan sehingga dapat mencapai optimum. (5) Pemasaran hasil pertanian

Atribut aspek ekonomi produksi yang digunakan paada penelitian ini, yaitu :

a. Kebijakan Bantuan Kredit Usaha Tani

Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiyaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Kredit ini disalurkan melalui Kelompok Tani, KUD maupun LSM yang telah direkomendasikan oleh dinas-dinas terkait diluar perbankan. Kredit Usaha Tani (KUT) ini merupakan fasilitas kredit berprioritas tinggi yang mengandung unsur subsidi, serta KUT ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kredit Bimas yang pada masa order baru. Dalam perkembangannya, bank penyalur KUT adalah bank umum yang telah ditunjuk pemerintah (BRI, Bank Danamon, Bank Pembangunan Daerah). Kredit ini bersifat masal, pemberian kredit ini disesuaikan dengan musim tanam dan dalam jangka waktu hanya satu tahun. (Darmawanto, 2008)

b. Kebijakan Harga Pupuk

Kebijakan harga pupuk diindonesia yaitu berupa subsidi. Menurut Habib Nazir (2004) subsidi adalah cadangan keuangan dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung suatu kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah. Tujuan kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) (Syafa'at, 2006). Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan harga pupuk yang berupa subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai:

(1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik

lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

c. Kebijakan Harga Hasil Pertanian

Kebijakan harga pada sektor pertanian merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur dikenal istilah *price support* sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan harga komoditas pertanian. Namun pada dasarnya, kebijakan harga komoditas pertanian (*agricultural price policy*) memiliki tujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Kebijakan harga untuk melindungi produsen diterapkan dalam bentuk harga dasar (*price floor*) sedangkan kebijakan harga untuk melindungi konsumen diterapkan dalam bentuk harga atap (*price ceiling*).

Faktor penyebab adanya kebijakan harga produk pertanian adalah tingkat harga hasil pertanian cenderung berfluktuatif atau tidak stabil yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Sistem kebijakan harga yang dapat dilakukan untuk produk pertanian yaitu penetapan semacam harga dasar yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas hasil pertanian dan mengenakan tarif, kuota, pengaturan waktu impor serta operasi pasar (OP) untuk komoditas pertanian tertentu. Adanya kebijakan harga produk hasil pertanian akan membantu petani meningkatkan harga jual produk pertanian dan ketergantungan akan subsidi, dan peningkatan produktivitas usahatani agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal.

Kebijakan harga merupakan salah satu langkah yang diambil ketika harga yang terbentuk di pasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar (*market failure*). Dalam hal ini, kebijakan harga merupakan intervensi regulator (pemerintah) sehingga harga yang terbentuk tidak dalam titik equilibrium. Pada beberapa negara berkembang seperti di India, kebijakan harga pertanian biasanya diikuti dengan pembenahan kelembagaan sebagai instansi teknis penerapan kebijakan harga (Acharya, 2013).

d. Pengembangan Penanganan Pasca Panen

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1986, penanganan pasca panen hasil pertanian bertujuan untuk menekan tingkat kehilangan dan/atau tingkat kerusakan hasil panen pertanian dengan meningkatkan

daya simpan dan daya guna hasil pertanian agar dapat menunjang usaha penyediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan bahan baku industri di dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, peningkatan penerimaan devisa negara, dan perluasan kesempatan kerja serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Salah satu kebijakan Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan adalah Kebijakan Pengembangan Penanganan Pasca Panen sesuai kebutuhan lapangan. Penanganan pasca panen tanaman pangan memegang peranan penting sebagai pendukung pembangunan pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan pada tahun 2015-2019, yaitu :

- 1) Menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan untuk menyelamatkan produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional.
 - 2) Penanganan pasca panen melalui penerapan *Good handling Practices (GHP)* dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri.
 - 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pasca panen tanaman pangan.
 - 4) Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pasca panen tanaman pangan.
 - 5) Pengembangan manajemen pasca panen berbasis kawasan produksi tanaman pangan. (Renstra Direktorat Pasca Panen Tanaman Pangan, 2015)
2. Aspek Pasar

Aspek pasar merupakan salah satu aspek yang berkenaan mengenai kondisi pasar dari bidang usaha yang di jalankan. Pasar dapat diartikan sebagai suatu organisasi tempat para penjual dan pembeli dapat dengan mudah saling berhubungan. Bagi pengusaha agribisnis pertanian, pasar merupakan tempat melempar hasil produksinya. Peluang pasar berangkat dapat diartikan sebagai peluang (*probability*) dari seseorang (produsen, petani atau pihak lain) untuk menjual hasil pertanian dengan mendapatkan keuntungan.

Pasar dapat diartikan sebagai tempat terjadinya penawaran dan permintaan, transaksi, tawar menawar nilai (harga), dan atau terjadinya pemindahan

kepemilikan melalui suatu kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kesepakatan tersebut dapat berupa kesepakatan harga, cara pembayaran, cara pengiriman, tempat pengambilan atau penerimaan produk, jenis dan jumlah produk, spesifikasi serta mutu produk, dan lain-lain. Dengan demikian, pasar pertanian merupakan tempat dimana terdapat interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan produk pertanian, terjadi kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan pemindahan kepemilikan. (Sarasutha, 2002)

Atribut aspek ekonomi produksi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Kebijakan Tunda Jual

Kementrian Pertanian menerapkan sistem tunda jual pada komoditas pertanian untuk menghindari harga yang rendah pada saat musim panen. Meningkatnya jumlah barang pada saat musim panen akan mengakibatkan harga turun drastis. Hal tersebut akan berbanding terbalik pada saat musim paceklik atau akan memasuki panen, harga akan melambung tinggi yang disebabkan semakin berkurangnya pasokan. Pengembangan tunda jual mengkondisikan petani untuk menahan hasil panennya dalam periode waktu tertentu untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (Mulyono, 2010).

Pengembangan sistem tunda jual pada umumnya bertujuan agar petani mampu menahan hasil panen sementara waktu untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik di pasar. Pada tingkatan tertentu upaya ini tidak hanya sekedar mendapat nilai lebih, tetapi juga sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan atas pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Upaya tersebut penting dilakukan, terutama ketika kebijakan pemerintah dalam perlindungan harga bagi petani padi tidak berjalan dengan baik dan kekuatan pasar yang tidak bisa dikendalikan pemerintah. Selain beras, jagung juga merupakan komoditas yang strategis, disamping digunakan untuk bahan pangan juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri pakan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan swasembada pangan terhadap 2 (dua) komoditas tersebut.

b. Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian

Upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah. Kekeringan dan banjir penurunan produktivitas

lahan pada sebagian areal pertanaman, hama penyakit tanaman yang terus berkembang, dan tingkat kehilangan hasil pada saat dan setelah panen yang masih tinggi merupakan masalah yang perlu dipecahkan serta tidak adanya pencatatan usahatani menyebabkan petani tidak dapat menghitung berapa besar keuntungan/kerugian yang diperoleh. Dalam menanggulangi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan jangka pendek yang pada intinya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gejolak harga. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu kebijakan pembelian hasil pertanian berupa penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) (Sumaryanto, 2009).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016, untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urutan Logistik (BULOG). Stabilisasi harga Pangan pada tingkat produsen, dilaksanakan dengan pembelian Pangan oleh Perum BULOG dengan Harga Acuan atau HPP di gudang Perum BULOG, dalam hal rata-rata Harga Pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan atau HPP. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis pangan yang menjadi Cadangan Pangan Pemerintah termasuk cadangan beras Pemerintah, dan keperluan untuk golongan tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016).

c. Pengadaan Pasar Komoditas

Pasar barang/komoditi atau dikenal dengan Bursa komoditi adalah suatu pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual atau beli barang/komoditi tertentu. Dalam pasar komoditi, barang yang diperjual-belikan adalah barang/komoditi yang laku dijual di pasar dunia/internasional, misalnya kopi, kedelai, kakao, gula, jagung, tembakau, karet, CPO (*Crude Palm Oil*), emas, perak, tembaga, dan lainnya.

Pada pasar/bursa komoditi dilihat dari sisi penyelenggaraan perdagangan dapat dibedakan menjadi dua macam pasar, yaitu:

- 1) Pasar fisik, adalah suatu kegiatan perdagangan yang penyerahan barang dagangan dari penjual kepada pembeli biasanya dilakukan segera setelah

transaksi atau ada penyerahan barang secara tunai. Pada pasar fisik terjadi transaksi efektif. Transaksi efektif menunjuk pada suatu transaksi jual beli di bursa yang di akhiri dengan penyerahan barang dagangan dari penjual kepada pembeli secara nyata.

- 2) Pasar komoditi berjangka adalah suatu kegiatan perdagangan dalam hal ini yang diperdagangkan adalah surat kontrak yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Pada pasar ini setelah terjadi transaksi tidak segera diikuti dengan penyerahan barang. Biasanya penyerahan barang dilakukan kemudian atau beberapa waktu bahkan beberapa bulan kemudian sesuai dengan perjanjian. Pada pasar komoditi berjangka motif utama transaksi seringkali hanya spekulatif bukan merupakan transaksi jual beli secara murni. Pada transaksi dengan motif spekulasi yang lebih dominan, maka transaksi tidak diakhiri dengan penyerahan barang, karena tujuannya bukan menyelesaikan persetujuan dagang dengan serah terima barang, melainkan pembayaran dan penerimaan dari adanya perbedaan harga (Sarasuta, 2002).

3. Aspek Kemitraan

Kemitraan usahatani adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat (Martodireso dkk, 2001).

Menurut Pranadji (2003) dalam kemitraan agribisnis terdapat tiga pola yaitu sebagai berikut.

- a. Pola kemitraan tradisional, pola kemitraan ini terjadi antara pemilik modal atau peralatan produksi dengan petani penggarap, peternak atau nelayan .
- b. Pola kemitraan pemerintah, pola kemitraan ini cenderung pada pengembangan kemitraan secara vertikal, model umumnya adalah hubungan bapak-anak angkat yang pada agribisnisnya perkembangan dikenal sebagai perkebunan inti rakyat.
- c. Pola kemitraan pasar, pola ini berkembang dengan melibatkan petan sebagai pemilik aset tenaga kerja dan peralatan produksi dengan pemilik modal besar yang bergerak dibidang industri pengolah dan pemasar hasil.

Menurut Arief (2008), secara umum ada tiga tipe kontrak/kemitraan di Indonesia, yaitu:

- 1) pertama tipe kemitraan inti plasma yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti. Perusahaan mitra membina kelompok mitra dalam hal a) penyediaan dan penyiapan lahan (kandang), b) pemberian sapi/prodi (saprotrak), c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi, e) pembiayaan, dan f) bantuan lain seperti efisiensi dan produktifitas usaha.
- 2) Kedua tipe sub kontrak, yaitu hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- 3) Ketiga tipe dagang umum, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Keempat pola kerjasama operasional, yaitu kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan/budidaya.

Atribut aspek ekonomi produksi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Pengembangan Kontrak Farming

Sistem pertanian kontrak (contract farming) merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani,

peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani, peternak dan nelayan kecil yang ikut dalam kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda (multiplier effects) bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas. (Arief, 2008)

Contract farming dapat juga dimaknai sebagai sistem produksi dan pemasaran berskala menengah, dimana terjadi pembagian beban resiko produksi dan pemasaran diantara pelaku agribisnis dan petani, peternak dan nelayan kecil; kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan mengurangi biaya transaksi. Menurut Eaton dan Shepherd (2001) dalam bukunya *Contract Farming: Partnership for Growth*, contract farming dapat dibagi menjadi lima model.

- (1) Pertama, *centralized model*, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian memprosesnya atau mengemasnya dan memasarkan produknya.
- (2) Kedua, *nucleus estate model*, yaitu variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.
- (3) Ketiga, *multipartite model*, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani.
- (4) Keempat, *informal model*, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman.
- (5) Kelima, *intermediary model*.

b) Temu usaha dengan pembeli hasil produksi

Temu usaha adalah pertemuan antara petani/pelaku agribisnis lainnya dengan pengusaha dan institusi terkait untuk meningkatkan kesempatan promosi/transaksi dari: (i) teknologi; (ii) produk pertanian dan hasil ikutannya; (iii) sarana produksi (Saprodi) pertanian; (iv) jasa yang dibutuhkan petani/pelaku agribisnis lainnya yang memiliki tujuan untuk mempromosikan teknologi pertanian dan meningkatkan transaksi dari Saprodi pertanian. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, 2013)

2.5 Tinjauan Teori Tentang Preferensi

2.5.1 Pengertian Preferensi

Preferensi berasal dari kata *preference* (Inggris) yang artinya lebih suka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), preferensi diterjemahkan sebagai kecenderungan untuk memilih sesuatu dari pada yang lain. Menurut Saputra (2000), Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah *perception* (Persepsi), *attitude* (sikap), *value* (nilai), *preference* (Kecenderungan), dan *satisfaction* (kepuasan). Komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.

Preferensi didefinisikan pada KBBI sebagai (1) (hak untuk) didahulukan dan diutamakan daripada yang lain atau prioritas; (2) pilihan atau kecenderungan atau kesukaan. Sedangkan menurut Chaplin (2002) preferensi adalah suatu sikap yang lebih menyukai sesuatu benda daripada benda lainnya. Karena banyak digunakan dalam bidang pemasaran, maka pembahasan mengenai preferensi mengacu pada istilah-istilah pada bidang pemasaran. Jika disesuaikan dengan istilah dalam bidang pertanian, maka konsumen dalam hal ini diartikan sebagai petani yang akan diukur preferensinya terhadap kebijakan pertanian.

2.6 Analisis Konjoin

2.6.1 Pengertian Analisis Konjoin

Kata *conjoint* menurut para praktisi riset diambil dari kata *CONsidered JOINTly*. Dalam kenyataannya kata sifat *conjoint* diturunkan dari kata benda *to conjoint* yang berarti *joined together* atau bekerja sama (Kuhfeld, 2000). Hair (2010) menjelaskan bahwa analisis conjoint merupakan teknik multivariat yang dikembangkan secara khusus untuk memahami bagaimana preferensi responden terhadap suatu jenis obyek (produk, jasa, atau ide-ide). Menurut Sari et al. (2010) analisis konjoin digunakan untuk membantu mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu produk atau jasa baik baru maupun lama yang paling disukai seseorang. Istilah-Istilah dalam Analisis Konjoin

Adapun beberapa istilah dalam analisis konjoin adalah :

1. Atribut, yaitu berupa variabel-variabel yang akan diteliti.
2. Taraf/level, yaitu bagian dari atribut yang menunjukkan nilai yang diasumsikan oleh atribut.

3. Stimuli, yaitu sekelompok atribut yang dievaluasi oleh responden. Dalam desain stimuli termasuk memilih atribut dan taraf atribut yang akan digunakan untuk membuat stimuli.
4. Nilai kepentingan relatif (*Relative Importance Value*), yaitu nilai yang menunjukkan atribut mana yang penting dalam mempengaruhi pilihan responden.
5. Nilai kegunaan (Utilitas), yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya semakin rendah kepuasan dari suatu barang maka nilai guna semakin rendah pula. Nilai guna dibedakan diantara dua pengertian:
 - a. Nilai guna marginal yaitu penambahan/pengurangan kepuasan akibat adanya penambahan/pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu.
 - b. Total nilai guna yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang-barang tertentu.

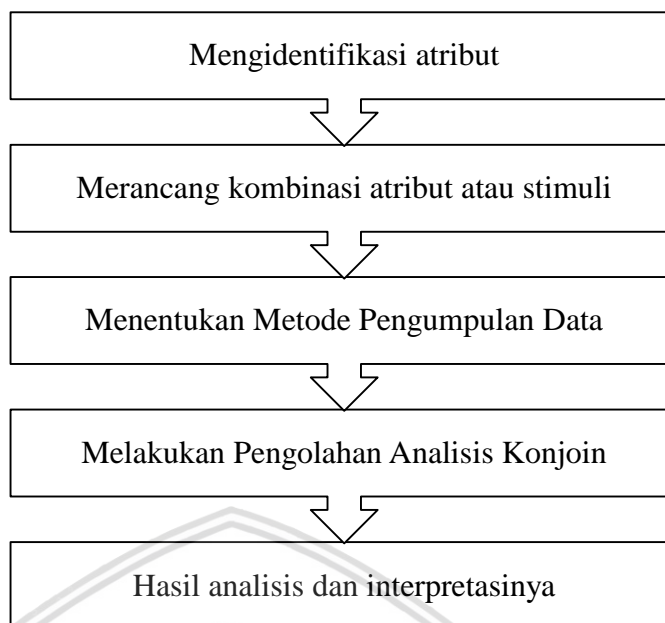
Ada dua cara mengukur nilai guna dari suatu komoditas yaitu secara kardinal (dengan menggunakan pendekatan nilai absolut) dan secara ordinal (dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, order atau rangking). Dalam pendekatan kardinal bahwa nilai guna yang diperoleh subjek dapat dinyatakan secara kuantitatif dan dapat diukur secara pasti. Untuk setiap unit yang dipilih akan dapat dihitung nilai gunanya. (Sugiarto, 2010).

2.6.2 Tujuan Analisis Konjoin

Pada dasarnya, tujuan analisis konjoin adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian. Hasil utama analisis konjoin adalah suatu bentuk (desain) produk barang atau jasa, atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian besar responden (Santoso, 2010).

2.6.3 Tahapan-Tahapan Analisis Konjoin

Dalam melakukan analisis konjoin terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada analisis konjoin.



Gambar 1. Tahapan Analisis Konjoin

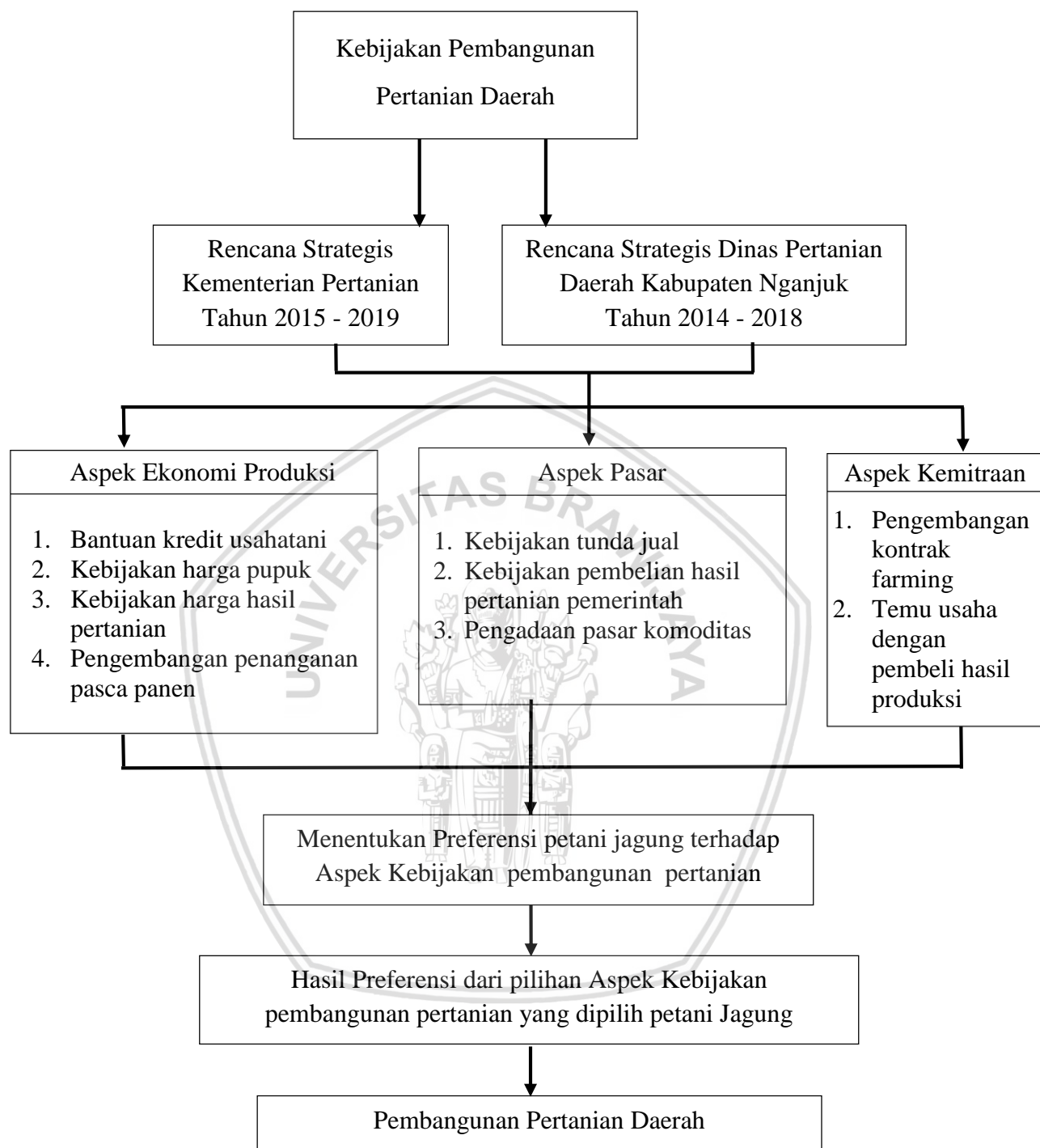


III. KERANGKA TEORITIS

3.1 Kerangka Penelitian

Pembangunan daerah dapat dicapai dengan meningkatkan pembangunan pertanian di daerah tersebut. Pembangunan pertanian merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani agar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, untuk memulihkan pertanian di Indonesia perlu peningkatan perhatian terhadap bidang pertanian yang dirumuskan dalam suatu kebijakan.

Menurut pernyataan Mulyono (2010), Kebijakan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkadang tidak dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaiannya kebijakan yang berlaku dengan kondisi di setiap daerah, selain itu kebijakan yang ada, yaitu berupa bantuan banyak yang tidak tepat sasaran sehingga petani yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut kehilangan haknya. Hal tersebut juga terjadi di salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan, yaitu dengan memberi kepercayaan kepada petani untuk memberikan tingkat preferensi terhadap kebijakan pertanian yang ada, sehingga nantinya pemerintah daerah dapat memperhitungkan hasil preferensi tersebut yang dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Hasil analisis akan menghasilkan preferensi dan prioritas petani dalam memilih atribut pada aspek pertanian. Kerangka penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Preferensi Petani Jagung Terhadap Kebijakan Pemerintah

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Preferensi dari petani jagung terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian di salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk adalah Aspek Pasar.
2. Diduga kombinasi atribut dari aspek kebijakan pertanian hasil preferensi petani jagung yang lebih diprioritaskan petani adalah atribut harga hasil pertanian dan pembelian hasil pertanian.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Menurut Sugiyono (2012), definisi operasional merupakan penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Menurut Nursalam (2008), variabel merupakan ukuran atau ciri yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena yang ada.

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Konsep	Sub Variabel	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
Preferensi	Aspek Ekonomi Produksi	Bantuan kredit usaha tani	Kredit yang diberikan kepada para petani guna mendukung peningkatan produksi pangan melalui pembiayaan usaha tani dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura	<p>Skor diberikan berdasarkan kriteria :</p> <p>5 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sangat sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek ekonomi produksi.</p> <p>4 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek ekonomi produksi.</p> <p>3 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang kurang sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek ekonomi produksi.</p> <p>2 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek ekonomi produksi.</p> <p>1 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sangat tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek ekonomi produksi</p>
		Kebijakan harga pupuk	Kebijakan harga pupuk yang diberikan berupa subsidi harga pupuk dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET).	
		Kebijakan harga hasil pertanian	Kebijakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap produk hasil pertanian.	
		Pengembangan penanganan pasca panen	Suatu bentuk penanganan terhadap produk hasil pertanian yang dilakukan setelah panen untuk menghasilkan produk siap jual ataupun siap dikonsumsi.	

Preferensi	Aspek Pasar	Kebijakan tunda jual	Suatu kebijakan yang menerapkan suatu sistem penundadaan penjualan pada komoditas pertanian untuk menghindari harga yang rendah pada saat musim panen.	Skor diberikan berdasarkan kriteria : 5 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sangat sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek pasar 4 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek pasar 3 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang kurang sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek pasar 2 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek pasar 1 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sangat tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek pasar
		Kebijakan pembelian hasil pertanian	Suatu kebijakan yang dilakukan dengan adanya pembelian oleh Pemerintah terhadap produk hasil pertanian yang dilaksanakan dengan adanya pembelian Pangan oleh Perum BULOG dengan Harga Acuan atau HPP di gudang Perum BULOG.	
		Pengadaan pasar komoditas	Suatu pasar yang kegiatannya mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam suatu pameran untuk melaksanakan transaksi jual atau beli barang/komoditi tertentu dalam jumlah yang besar sesuai kesepakatan antar keduanya.	

Preferensi	Aspek Kemitraan	Pengembangan Kontrak Farming	Terjalannya kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah atau besar (perusahaan mitra) dengan suatu kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani pada usaha taninya.	<p>Skor diberikan berdasarkan kriteria :</p> <p>5 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sangat sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek kemitraan</p> <p>4 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek kemitraan produksi.</p> <p>3 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang kurang sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek kemitraan</p> <p>2 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek kemitraan</p> <p>1 = mampu memilih atribut kebijakan aspek ekonomi produksi yang sangat tidak sesuai dengan permasalahan yang dialami dalam aspek kemitraan</p>
		Temu usaha dengan pembeli hasil produksi	Pertemuan antara petani/pelaku agribisnis lainnya dengan pengusaha dan institusi terkait untuk meningkatkan kesempatan promosi/transaksi dari teknologi, produk pertanian dan hasil ikutannya, sarana produksi (Saprodi) pertanian, dan juga jasa yang dibutuhkan petani.	



IV. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengukur preferensi petani terhadap masing-masing atribut kebijakan pembangunan pertanian menggunakan analisis konjoin. Manfaat yang dapat diambil dari penggunaan analisis konjoin ini dilihat dari teori preferensi konsumen adalah produsen dapat mencari solusi kompromi yang optimal dalam merancang atau mengembangkan suatu produk, sehingga pada preferensi petani ini nantinya pemerintah dapat mencari solusi yang optimal dalam merancang atau mengembangkan suatu kebijakan pembangunan pertanian.

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pernyataan *key informan* yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dengan pertimbangan bahwa di kelurahan tersebut merupakan salah satu sentra pengembangan produksi jagung. Pada kelurahan ini mayoritas penduduknya adalah bermatapencaharian sebagai petani. Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Juli 2018.

4.3 Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan pendekatan *non probability sampling* dimana pengumpulan informasi dan pengetahuan dari responden menggunakan metode dengan teknik *simple random sampling*, yaitu dimana semua petani jagung di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi responden pada penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani jagung di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu warga yang bermatapencaharian sebagai petani jagung di kelurahan tersebut. Penentuan responden penelitian mengenai preferensi petani jagung ini menggunakan metode *simple random sampling*. Metode tersebut digunakan karena sample yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara acak. Adapun pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah dengan mengambil dari jumlah petani jagung di Kelurahan Warujayeng yaitu sebanyak 798 petani.

Cara pengukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel agar sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi ditentukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Parel et al. (1973). Adapun rumus Parel et al. (1973) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2\sigma^2}{Nd^2 + Z^2\sigma^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah populasi

Z = nilai ditingkat kepercayaan tertentu, yaitu 95% (dengan nilai sebesar 1.96)

σ^2 = nilai varians dari populasi

d = kesalahan maksimum yang ditoleransi (5%)

Langkah awal dalam menghitung jumlah sampel penelitian, dilakukan dengan mengukur varians populasi (σ^2). Namun, varians populasi tidak diketahui sehingga digunakan varians sampel (s^2) sebagai gantinya, dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2s^2}{Nd^2 + Z^2s^2}$$

Keterangan:

s^2 = nilai varians dari sampel

Perhitungan varians sampel (s^2) dalam penelitian ini menggunakan sampel kecil (n) sejumlah 20 petani yang keragamannya didasarkan pada keragaman luas lahan. Rumus untuk menghitung varians dari sampel ditunjukkan pada persamaan:

$$s^2 = \frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

Keterangan:

n = populasi kecil

X = luas lahan yang dimiliki setiap petani

Berdasarkan rumus tersebut, setelah dilakukan penghitungan diperoleh nilai varians dari sampel sebesar 0.0294. Setelah itu dilakukan penghitungan sampel minimal yang harus diambil dari total populasi dan diperoleh jumlah sampel yang digunakan agar dapat mewakili keseluruhan populasi yaitu sebanyak 40 orang. Sehingga pada penelitian penulis mengambil sebanyak 50 responden.

Perhitungan sampel disajikan pada Lampiran 2.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan petani jagung di kelurahan Warujayeng dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi kebijakan pembangunan pertanian dengan bantuan kuisisioner untuk mengetahui atribut kebijakan pembangunan yang diprioritaskan oleh petani yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialaminya. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis kuesioner ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. (Sugiyono, 2008). Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung pilihan jawaban yang sudah disediakan

2. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan untuk mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan dilakukan pengambilan gambar yang dilakukan secara langsung dilapang yaitu berupa infrastruktur dan saprodi yang ada di kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tangjunganom, Kabupaten Nganjuk.

3. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan menampilkan data-data pendukung yang didapatkan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Kantor Kelurahan Warujayeng, dan UPTD Dinas Pertanian (Badan Penyuluhan) Cabang Warujayeng.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknis Analisis kuantitatif merupakan suatu teknik analisis data yang menggunakan angka untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini metode untuk pengolahan data menggunakan analisis Konjoin.

1. Analisis Konjoin

Analisis konjoin merupakan suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi seseorang terhadap berbagai pilihan yang ada. Berikut adalah langkah-langkah dalam analisis conjoin pada penelitian ini.

a. Tahap 1. Mengidentifikasi Atribut

Tabel 2. Tahap Identifikasi Atribut

No.	Atribut	Taraf	Level
1.	Aspek Ekonomi Produksi	1	Bantuan kredit usaha tani
		2	Kebijakan harga pupuk
		3	Kebijakan harga hasil pertanian
		4	Pengembangan penanganan pasca panen
2.	Aspek Pasar	1	Kebijakan tunda jual
		2	Kebijakan pembelian hasil pertanian
		3	Pengadaan pasar komoditas
3.	Aspek Kemitraan	1	Pengembangan kontrak farming
		2	Temu usaha dengan pembeli hasil produksi

Langkah awal dalam melakukan analisis konjoin yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dimulai dari mendefinisikan produk sebagai kumpulan dari atribut-atribut dimana setiap atribut terdiri atas beberapa taraf/level.

b. Tahap 2. Merancang Kombinasi Atribut (Stimuli)

Setelah mengidentifikasi atribut beserta taraf-tarafnya, kemudian dilakukan perancangan stimuli yaitu kombinasi taraf antar atribut. Pendekatan yang umum digunakan untuk merancang stimuli yaitu kombinasi lengkap (*full profile*) atau evaluasi banyak faktor dan kombinasi berpasangan (*pairwise comparison*) atau evaluasi dua faktor (Kuhfeld, 2000). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Full Profile*. Analisis konjoin *full-profile* yang diperkenalkan terlebih dahulu merupakan rancangan kombinasi yang menggambarkan profil produk secara lengkap. Untuk membentuk stimuli dirancang dengan menggunakan Aplikasi *SPSS For Windows*. Setiap stimuli berisi kombinasi antara atribut dengan taraf, dimana tiap stimuli menggambarkan profil tiap objek. Responden mengevaluasi masing-masing stimuli dengan cara *rating* (memberi

nilai peringkat), mulai dari stimuli yang paling diminati (dianggap penting) hingga stimuli yang paling tidak diminati (dianggap paling tidak penting).

c. Tahap 3. Menentukan Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam analisis konjoin dapat berupa data non-metrik (data berskala nominal atau ordinal atau kategorial) maupun data metrik (data berskala interval atau rasio). Data non-metrik digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk non-metrik, responden diminta untuk membuat *ranking* atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Perangkingan dimulai dari 1 dan seterusnya hingga *ranking* terakhir bagi stimuli yang paling tidak disukai. Sedangkan, Data metrik digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk metrik, responden diminta untuk memberikan nilai atau *rating* terhadap masing-masing stimuli. Dengan cara ini, responden akan dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing stimuli secara terpisah. Pemberian nilai atau *rating* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

- 1) Menggunakan skala Likert mulai dari 1 hingga 5 (1 = paling tidak disukai dan 5 = paling disukai)
- 2) Menggunakan nilai *ranking*, artinya untuk stimuli yang paling tidak disukai diberi nilai tertinggi setara dengan jumlah stimulinnya, sedangkan stimuli yang paling disukai diberi nilai satu.

d. Tahap 4. Melakukan Pengolahan Analisis Konjoin

Pada tahap ini merupakan tahap penilaian stimuli, setiap responden diminta untuk menilai atau mengurutkan stimuli, nilai ranking (yang paling diinginkan hingga yang paling tidak diinginkan) sehingga mencerminkan perilaku konsumen dalam situasi nyata. Proses analisis data dengan metode konjoin menggunakan bantuan *software* SPSS.

e. Tahap 5. Interpretasi Hasil

Kuhfeld (2000) menyatakan ada beberapa ketentuan dalam melakukan interpretasi hasil, yaitu :

- 1) Taraf yang memiliki nilai kegunaan lebih tinggi adalah taraf yang lebih disukai.
- 2) Total nilai kegunaan masing-masing kombinasi sama dengan jumlah nilai kegunaan tiap taraf dari atribut-atribut tersebut.

- 3) Kombinasi yang memiliki total nilai kegunaan tertinggi adalah kombinasi yang paling disukai responden.
- 4) Atribut yang memiliki perbedaan nilai kegunaan lebih besar antara nilai kegunaan taraf tertinggi dan terendahnya merupakan atribut yang lebih penting.

Tahap ini merupakan tahap terakhir, maka akan dilakukan pembahasan dan interpretasi hasil dari apa yang sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini akan didapatkan nilai utility yang merupakan nilai setiap taraf dari masing-masing faktor. Nilai utility positif menjelaskan bahwa atribut kebijakan pembangunan pertanian lebih diprioritaskan oleh petani, sedangkan nilai utility yang negatif menjelaskan bahwa atribut kebijakan pembangunan pertanian lebih kurang diprioritaskan oleh petani sehingga nantinya akan diketahui kebijakan pertanian yang paling dipilih oleh petani sesuai preferensinya dan hasil tersebut dapat dibandingkan apakah dapat meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

Pada hasil akan ada hasil dari pengukuran korelasi, baik secara Pearson ataupun Kendall yang apabila menghasilkan angka yang relatif kuat yaitu diatas 0.5, maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara Estimates dan Actual, atau ada *predictive accuracy* yang tinggi pada proses konjoin. Sedangkan untuk menguji signifikansi kedua korelasi diatas. Jika signifikansinya di bawah 0.05 maka kedua korelasi tersebut mempunyai signifikansi yang cukup kuat. Sedangkan jika hasil signifikansinya diatas 0.05 maka signifikansinya tidak kuat.

V. HASIL DAH PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Desa

5.1.1 Keadaan Geografis dan Batas Administrasi

Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom merupakan salah satu kelurahan dari 2 kelurahan dan 14 desa yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jarak pusat pemerintahan dari Balai Desa dengan Kecamatan Tanjunganom yaitu $\pm 1,5$ Km, sedangkan jarak dengan pusat Kota atau Kabupaten Nganjuk yaitu ± 12 Km. Peta Kelurahan Warujayeng ditunjukkan pada Lampiran. Adapun batas-batas administratif Kelurahan Warujayeng adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom.
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjunganom.
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Jogomerjo, Kecamatan Tanjunganom.

Kelurahan Warujayeng terdiri dari 8 dusun, 36 Rukun Warga (RW) dan 100 Rukun Tetangga (RT). Dusun tersebut meliputi dusun Kujonmanis, dusun Bulakrejo, dusun Bleton, dusun Pengkol, dusun Bulurejo, dusun Bojan, dusun Gambirejo dan dusun Cemoro.

5.1.2 Keadaan Alam dan Penggunaan Lahan

Kelurahan Warujayeng memiliki curah hujan 298 mm, suhu rata-rata daratan 33°C dan berada pada ketinggian sebesar 46 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan data dari kantor kelurahan Warujayeng, luas wilayah secara keseluruhan yaitu 818.101 ha yang terdiri dari lahan sawah 352.250 ha, lahan ladang 408.615 ha dan lahan lainnya 62.236 ha.

5.1.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk di Kelurahan Warujayeng dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan penghasilan. Berikut ini merupakan data distribusi penduduk.

1. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan profil Kelurahan Warujayeng pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kelurahan Warujayeng berjumlah 19.625 jiwa dengan 5.599 KK (Kepala Keluarga). Distribusi penduduk Kelurahan Warujayeng berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	9.345	47,618
2.	Perempuan	10.280	52,382
Total		19.625	100

Sumber : Profil Kelurahan, 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel 3, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 9.345 orang dengan persentase sebesar 47,618% dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 10.280 orang dengan persentase sebesar 52,382%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penduduk di Kelurahan Warujayeng yang memiliki jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki dengan selisih diantara keduanya yaitu 935 orang.

2. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

Penduduk di Kelurahan Warujayeng memiliki keragaman dalam hal umur. Distribusi penduduk yang berada di Kelurahan Warujayeng berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	0 – 7	2.779	14,160
2.	8 – 18	4.210	21,452
3.	19 – 56	10.681	54,425
4.	> 56	1.955	9,962
Total		19.625	100

Sumber : Profil Kelurahan, 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel 4, jumlah penduduk yang paling mendominasi di Kelurahan Warujayeng berdasarkan umur adalah penduduk dengan interval umur 19 – 56 tahun, yaitu sebanyak 10.681 orang dengan persentase sebesar 54,425 %. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa di Kelurahan Warujayeng, memiliki banyak penduduk dengan umur produktif, sehingga penduduknya berpotensi untuk meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Sedangkan, penduduk berdasarkan umur dengan jumlah paling sedikit adalah penduduk dengan interval umur > 56 tahun, yaitu sebanyak 1.955 orang dengan persentase sebesar 9,962%.

3. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Penduduk di Kelurahan Warujayeng memiliki keragaman tingkat pendidikan. Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Warujayeng dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Taman Kanak-kanak	180	2,741
2.	Sekolah Dasar/ sederajat	1.360	20,713
3.	SMP/ sederajat	2.360	35,943
4.	SMA. sederajat	2.234	34,024
5.	Akademik/D1-D3	169	2,574
6.	Sarjana S1	174	2,650
7.	Sarjana S2	89	1,355
8.	Sarjana S3	-	-
Total		6. 566	100

Sumber: Profil Kelurahan, 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa penduduk yang paling dominan di Kelurahan Warujayeng merupakan penduduk yang merupakan tamatan SMP/ sederajat, yaitu sebanyak 2.360 orang dengan persentase sebesar 35,943%. Kemudian pada posisi kedua terbanyak merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan SMA/ sederajat sebanyak 2.234 orang dengan persentase sebesar 35,024%, kemudian diikuti dengan penduduk tamatan sekolah dasar/ sederajat sebanyak 1.360 orang dengan persentase sebesar 20,713%, tamatan taman kanak-kanak sebanyak 180 orang dengan persentase sebesar 2,741%, tamatan sarjana S1 sebanyak 174 orang dengan persentase sebesar 2,650%, tamatan D1-D3 sebanyak 169 orang dengan persentase sebesar 2,574%, tamatan sarjana S2 sebanyak 89 orang dengan persentase sebesar 1,355%. Dan yang terakhir tidak ada penduduk yang merupakan tamatan S3.

4. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk di Kelurahan Warujayeng dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		Laki – Laki	Perempuan		
1.	Petani	1.071	675	1.746	18,03
2.	Buruh tani	4.236	1.654	5.890	60,84
3.	Buruh migran	-	-	-	-
4.	Pengrajin industri RT	679	126	805	8,3
5.	Pedagang keliling	23	126	149	1,53
6.	Peternak	-	-	-	-
7.	Dokter swasta	6	5	11	0,11
8.	Bidan swasta	-	58	58	0,59
9.	Pegawai negeri sipil	305	384	689	7,11
10.	TNI/POLRI	332	-	332	3,42
Total		6652	3028	9680	100

Sumber: Profil Kelurahan, 2016 (Diolah)

Berdasarkan tabel 6 tentang distribusi mata pencapaian penduduk Kelurahan Warujayeng, dapat diketahui bahwa buruh tani merupakan mata pencapaian yang memiliki jumlah terbesar urutan pertama dibandingkan dengan pekerjaan lainnya yaitu sebanyak 5.890 orang dengan persentase sebesar 60,84%, lalu yang memiliki jumlah terbesar urutan kedua yaitu yang memiliki mata pencapaian sebagai petani sebanyak 1.746 orang dengan persentase sebesar 18,03%. Urutan ketiga yaitu yang memiliki mata pencapaian sebagai pengrajin industri rumah tangga sebanyak 805 orang dengan persentase sebesar 8,3 %. Urutan terbesar keempat yaitu yang memiliki mata pencapaian sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 689 orang dengan persentase sebesar 7,11%. Urutan kelima yaitu yang memiliki mata pencapaian sebagai TNI/POLRI sebanyak 332 orang dengan persentase sebesar 3,42%. Urutan selanjutnya yaitu yang memiliki mata pencapaian sebagai pedagang keliling sebanyak 149 orang dengan persentase sebesar 1,53%, lalu mata pencapaian sebagai bidan swasta sebanyak 58 orang dengan persentase sebesar 0,59% dan mata pencapaian sebagai dokter swasta sebanyak 11 orang dengan persentase 0,11%. Terakhir, tidak terdapat penduduk yang memiliki mata pencapaian sebagai buruh migran dan peternak.

5.2 Karakteristik Petani Responden

5.2.1 Umur Petani Responden

Pada umumnya tingkat produktivitas kerja seseorang ditentukan oleh usia seseorang. Seseorang yang memiliki umur lebih tua, meskipun dinilai memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak tetapi tidak bisa mengimbangi produktivitas orang yang lebih muda karena dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang tersebut. Begitu pula dengan orang yang terlalu muda juga tidak bisa mengimbangi produktivitas kerja orang yang lebih tua karena dipengaruhi oleh faktor pengalaman dalam bekerja. Sehingga dapat diartikan bahwa seseorang yang terlalu tua dan terlalu muda akan sulit untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang maksimal. Menurut Damanik (2007), penduduk usia 15-64 tahun merupakan usia kerja sedangkan seseorang yang berumur dibawah 15 tahun masih belum layak untuk bekerja dan di atas 64 tahun sudah tidak layak untuk bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut pengelompokan umur responden mengenai petani di Kelurahan Warujayeng dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok umur 25- 44 tahun, kelompok umur 45-64 tahun dan umur 65-70 tahun. Data tersebut didasarkan pada data primer yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan didasarkan pada umur terkecil dan terbesar dari responden. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 7. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Usia

No.	Kelompok umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	25-44	11	22
2.	45-64	38	76
3.	65-70	1	2
	Total	50	100

Sumber : Data Primer, 2017 (Diolah)

Pada tabel 7, menjelaskan bahwa dari 50 responden, jumlah responden dengan kelompok umur terbanyak yaitu responden yang berumur antara 45-64 tahun sebanyak 38 orang dengan persentase sebanyak 76 %, lalu terdapat responden yang berumur antara 25-45 tahun sebanyak 11 orang dengan persentase sebanyak 22 % dan yang terakhir yaitu responden yang berumur antara 65-70 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase sebanyak 2 %. Umur responden yang paling muda yaitu berumur 25 tahun dan umur responden yang paling tua yaitu berumur 70 tahun. Menurut data tersebut, sebagian besar responden berumur antara 45-64 tahun yang merupakan usia kerja atau usia layak untuk bekerja.

5.2.2 Tingkat Pendidikan Petani Responden

Tingkat pendidikan petani responden dapat dilihat dari pendidikan formal yang pernah di ikuti oleh responden yaitu petani jagung yang terdapat di Kelurahan Warujayeng. Tingkat tinggi rendahnya pendidikan petani akan menanamkan sikap yang menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern. Mereka yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya kurang menyenangi inovasi sehingga sikap mental untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pertanian kurang (Kusuma, 2006). Menurut Negara (2000) mengenai tingkat pendidikan petani, petani yang berpendidikan tinggi relatif lebih cepat dalam melaksanakan adopsi inovasi. Tingkat pendidikan manusia umumnya menunjukkan daya kreativitas manusia dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan sumber - sumber daya alam yang tersedia (Kartasapoetra, 2014). Tingkat pendidikan formal yang dimiliki petani akan menunjukkan tingkat pengetahuan serta wawasan yang luas untuk petani menerapkan apa yang diperolehnya untuk peningkatan usahataniya dan juga dalam mengambil keputusan dalam usaha taninya (Hasyim, 2006). Distribusi pendidikan petani responden telah disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah	-	-
2.	Tidak tamat SD	2	4
3.	Tamat SD	25	50
4.	Tamat SMP	12	24
5.	Tamat SMA	9	18
6.	Tamat D3	1	2
7.	Sarjana	1	2
Total		50	100

Sumber: Data Primer, 2017 (Diolah)

Pada tabel 8, dapat diketahui bahwa petani jagung yang menjadi responden dengan jumlah urutan tertinggi yaitu petani yang memiliki tingkat pendidikan tamat SD yaitu sebanyak 25 orang dengan perentase sebesar 50%, selanjutnya pada urutan kedua yaitu petani responden yang memiliki tingkat pendidikan tamat SMP sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 24%, kemudian pada urutan ketiga yaitu petani responden yang memiliki tingkat pendidikan tamat SMA sebanyak 9

orang dengan persentase sebesar 18%, lalu petani responden yang memiliki tingkat pendidikan tidak tamat SD sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 4%. Selanjutnya petani responden yang memiliki tingkat pendidikan Tamat D3 dan Sarjana sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, lalu tidak terdapat petani responden yang tidak sekolah.

5.2.3 Tingkat Pengalaman Petani Responden

Tingkat pengalaman petani responden dapat dilihat dari lamanya petani responden memulai usaha taninya, mulai dari awal mula bertani hingga saat ini. Petani yang sudah lama berusahatani akan lebih banyak pengalaman atau wawasan terkait kebijakan pertanian yang telah didengar dan diterimanya daripada petani pemula. Hal ini dikarenakan pengalaman yang lebih banyak, sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan (Lubis, 2000). Lamanya berusahatani untuk setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu lamanya berusahatani dapat dijadikan bahan pertimbangan seseorang dalam memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan dalam banyak hal (Hasyim, 2006). Data mengenai jumlah dan persentase responden menurut tingkat pengalamannya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Distribusi Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pengalaman

No.	Lama Pengalaman (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	0 – 10	6	12
2.	11 – 20	11	22
3.	21 - 30	21	42
4.	31 – 40	12	24
Total		50	100

Sumber: Data Primer, 2017 (Diolah)

Pada tabel 9, dapat diketahui bahwa tingkat pengalaman petani jagung yang menjadi responden dengan jumlah urutan tertinggi yaitu petani yang memiliki tingkat pengalaman bertani antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 42%. Pada urutan kedua yaitu petani responden yang memiliki tingkat pengalaman bertani antara 31- 40 tahun, yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 24%. Pada urutan ketiga yaitu petani responden yang memiliki tingkat pengalaman bertani antara 0 - 10 tahun, yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 22%. Pada urutan terakhir yaitu petani responden yang

memiliki tingkat pengalaman bertani antara 0 – 11 tahun yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 12%.

5.2.4 Status Pekerjaan Petani Responden

Sejumlah 50 orang petani yang dijadikan sebagai responden, merupakan seseorang yang bermatapencaharian sebagai petani jagung. Kategori petani responden yang dijadikan sebagai responden di Kelurahan Warujayeng dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pemilik dan penggarap, penyewa dan penggarap, serta penggarap dan bagi hasil. Data mengenai jumlah dan persentase responden menurut status pekerjaan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Jumlah dan persentase Responden Menurut Status Pekerjaan

No.	Status Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pemilik dan Penggarap	21	42
2.	Penyewa dan Penggarap	26	52
3.	Penggarap dan Bagi Hasil	3	6
Total		50	100

Sumber: Data Primer, 2017 (Diolah)

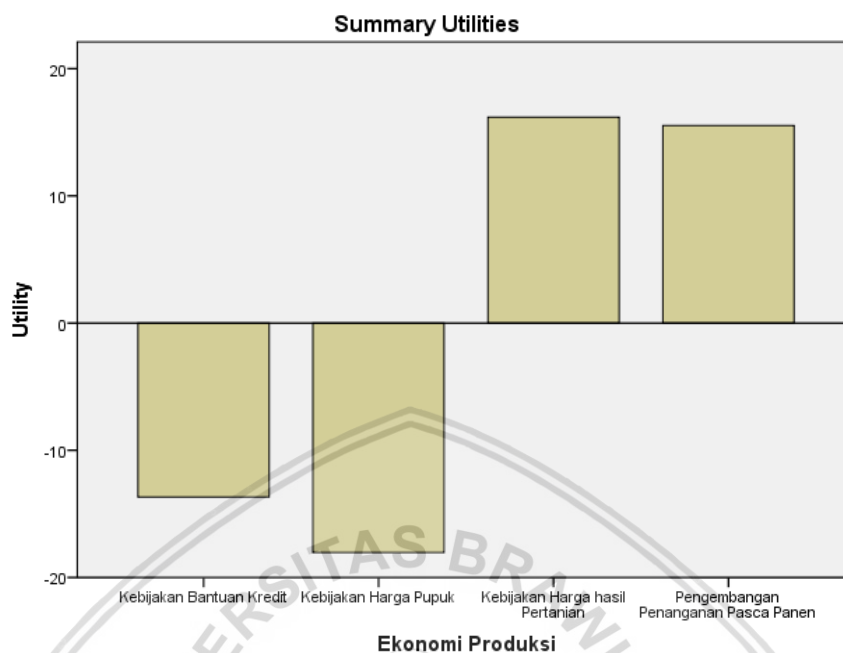
Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa petani responden mayoritas merupakan petani yang memiliki status sebagai penyewa dan penggarap, yaitu sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 52%. Pada urutan kedua yaitu petani responden yang memiliki pekerjaan sebagai pemilik dan penggarap sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 42%. Pada urutan terakhir yaitu petani responden yang memiliki pekerjaan sebagai penggarap dan bagi hasil sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 6%.

5.3 Hasil Analisis Preferensi Petani Jagung Terhadap Masing-masing Atribut Aspek Kebijakan Pertanian

Aspek Kebijakan Pertanian yang digunakan pada penelitian ini yaitu : (1) Aspek Ekonomi Produksi, (2) Aspek Pasar, dan (3) Aspek Kemitraan. Berikut merupakan hasil analisis Konjoin terhadap ketiga Aspek Kebijakan Pertanian :

1) Aspek Ekonomi Produksi

Hasil Preferensi pada Aspek Ekonomi Produksi dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Hasil Analisis Preferensi Aspek Ekonomi Produksi

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2018)

Pada penelitian ini atribut yang digunakan dalam Aspek Ekonomi Produksi terdiri dari empat atribut, yaitu (1) Kebijakan Bantuan Kredit, (2) Kebijakan Harga Pupuk, (3) Kebijakan Harga Hasil Pertanian, dan (4) Pengembangan Penanganan Pasca Panen. Hasil Preferensi menggunakan analisis Konjoin terhadap Aspek Ekonomi Produksi diperoleh hasil bahwa atribut Kebijakan Bantuan Kredit dengan nilai utilitas -13,672 dan atribut Kebijakan Harga Pupuk dengan nilai utilitas -18,035 merupakan atribut yang kurang diprioritaskan dalam Aspek Ekonomi Produksi karena atribut bernilai negatif. Atribut tersebut tidak diprioritaskan dibandingkan dengan atribut lainnya karena ada atribut lain yang lebih diprioritaskan. Hasil tersebut sesuai dengan keadaan dilapang bahwa, pada Kebijakan Bantuan Kredit sangat mudah diperoleh dan persyaratannya sangat mudah oleh para petani di Kelurahan Warujayeng, contohnya yaitu Kebijakan Bantuan Kredit yang ditawarkan oleh Bank BRI dan jarak dari rumah-rumah petani dengan Bank tersebut mudah untuk diakses, sehingga pemilihan atribut tersebut tidak menjadi prioritas utama petani jagung di Kelurahan Warujayeng. Untuk atribut Kebijakan Harga Pupuk, atribut tersebut tidak diprioritaskan dibandingkan dengan atribut lainnya karena harga pupuk di

kelurahan Warujayeng sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah/subsidi pemerintah, sehingga atribut ini tidak menjadi prioritas utama para petani.

Pada atribut Kebijakan Harga Hasil Pertanian didapatkan hasil dengan nilai utilitas 16,184 dan atribut Pengembangan Penanganan Pasca Panen dengan nilai utilitas 15,523 yang merupakan atribut yang diprioritaskan dalam aspek Aspek Ekonomi Produksi karena nilai atribut tersebut bernilai positif. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan dilapang, karena untuk Kebijakan Harga Hasil Pertanian perlu diperbarui lagi, karena banyak petani jagung di Kelurahan Warujayeng masih banyak yang mendapatkan harga jual dibawah harga yang ditetapkan pemerintah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Henny (2006), bahwa pada otonomi daerah, diketahui bahwa dari seluruh perda yang terbit di Provinsi Lampung dan Jawa Timur dalam kurun waktu 2002-2006 yang berjumlah 3633 buah, hanya kurang lebih 200 perda (5,5%) yang terkait dengan perdagangan hasil pertanian terutama harga hasil pertanian. Dari kedua provinsi ini dapat dicatat bahwa pemerintah daerah belum memusatkan perhatian untuk merumuskan perda yang menyangkut harga hasil pertanian yang diprioritaskan oleh petani, sehingga diperlukan perda yang membahas tentang harga hasil pertanian. Dengan adanya pembaharuan peraturan daerah tersebut akan dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan pembangunan daerah.

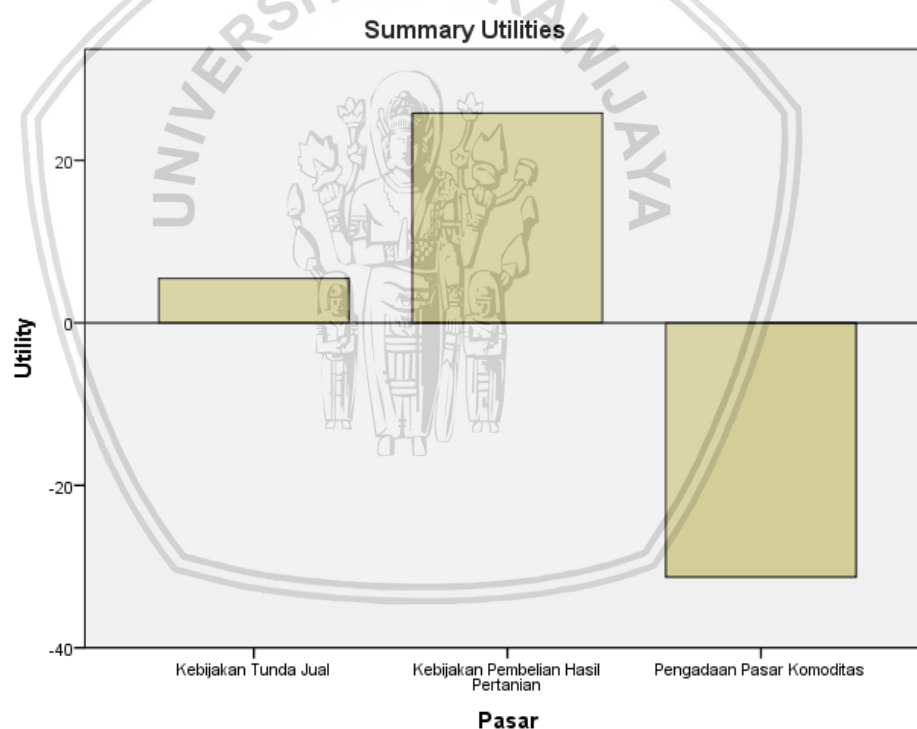
Untuk Pengembangan Penanganan Pasca Panen, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh petani jagung di Kelurahan Warujayeng karena dengan ketidakpastian harga yang diterima petani, petani lebih memilih untuk melakukan sistem tebasan karena pendapatan yang diterima hampir sama dengan para petani yang menjual jagungnya kepada pengepul. Sehingga atribut Kebijakan Harga Hasil Pertanian dan atribut Pengembangan Penanganan Pasca Panen menjadi atribut yang lebih diprioritaskan oleh petani. Dari pernyataan responden penelitian ini, para petani jagung di kelurahan Warujayeng masih banyak yang belum mengerti tentang penanganan pasca panen jagung dan cenderung langsung menjual hasil panennya kepada pengepul.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al (2006), diperlukan adanya pembimbingan dan pelatihan kepada petani terkait dengan penanganan pasca panen jagung dikarenakan banyak petani yang jarang melakukan pengolahan komoditas jagung secara mandiri. Dengan adanya penanganan dan menyimpan jagung selama beberapa bulan saja, petani akan memperoleh tambahan pendapatan karena harga jagung biasanya meningkat beberapa bulan setelah panen raya. Dengan adanya pengembangan penanganan pasca panen jagung, maka akan meningkatkan pendapatan petani di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom.

2) Aspek Pasar

Hasil Preferensi pada Aspek Pasar dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Hasil Analisis Preferensi Aspek Pasar



Sumber : Data Sekunder, Diolah (2018)

Pada penelitian ini atribut yang digunakan dalam Aspek Pasar terdiri dari tiga atribut yaitu (1) Kebijakan Tunda Jual, (2) Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian, dan (3) Pengadaan Pasar Komoditas. Hasil Preferensi menggunakan analisis Konjoin terhadap Aspek Pasar diperoleh hasil bahwa pada atribut Pengadaan Pasar Komoditas diperoleh nilai atribut -31,293 merupakan atribut yang kurang diprioritaskan dalam hal faktor Pasar karena nilai utilitas bernilai

negatif. Hal tersebut kurang diprioritaskan dikarenakan atribut tersebut kurang cocok untuk diterapkan dikelurahan Warujayeng karena ruang lingkungannya kecil. Sehingga atribut tersebut tidak menjadi prioritas petani, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan keadaan dilapang.

Hasil penelitian pada atribut Kebijakan Tunda Jual dengan diperoleh nilai utilitas 5,471 sehingga merupakan atribut yang menjadi prioritas petani karena memiliki nilai utilitas positif. Turunnya harga pada komoditas pertanian terutama saat panen raya telah menjadi masalah laten yang sangat merugikan petani. Bahkan, fenomena tersebut seringkali membuat petani enggan memanen hasil pertaniannya karena biaya panen lebih besar daripada harga jual produknya (Muhi, 2011). Petani sebenarnya dapat menyiasatinya dengan melakukan tunda jual untuk menghindari kerugian akibat rendahnya harga saat panen raya. Namun demikian, petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk tidak menjual hasil panennya. Kondisi tersebut disebabkan, sebagian besar petani memposisikan hasil panennya sebagai "*cash crop*". Artinya, petani membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya (Ashari, 2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilakukan penyuluhan terkait dengan sistem tunda jual yang beranggotakan gapoktan jagung dalam satu lingkup desa/kelurahan seperti yang sudah dilakukan oleh para petani di Lampung untuk menstabilkan harga pada musim paceklik. Manfaat dari adanya sistem tunda jual, yaitu: (1) dapat memperkuat permodalan kelompok tani agar petani dapat melakukan tunda jual secara optimal, (2) menunda penjualan sebagian hasil panen pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga membaik, (3) meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran kelompok tani, agar posisi tawar dan nilai jual produk petani mampu meningkatkan pendapatan keluarga, (4) meningkatkan pendapatan petani/kelompok tani melalui penguatan modal usaha dan menumbuhkembangkan jiwa wira usaha dibidang pertanian

Hasil penelitian terhadap atribut Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian diperoleh nilai utilitas 25,822 yang berarti atribut yang lebih diprioritaskan dalam Aspek Pasar karena nilai utilitas bernilai positif. Hal tersebut dikarenakan

sebagian besar para petani di kelurahan Warujayeng merupakan petani penyewa tahunan/kontrak yang tidak memiliki lahan pertaniannya sendiri, sehingga lebih memilih untuk langsung menjual hasil produksinya supaya cepat balik modal usaha taninya. Pada atribut Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian, hal tersebut dibutuhkan para petani di kelurahan Warujayeng karena para petani tidak mendapat kepastian harga dari pengepul/pedagang besar.

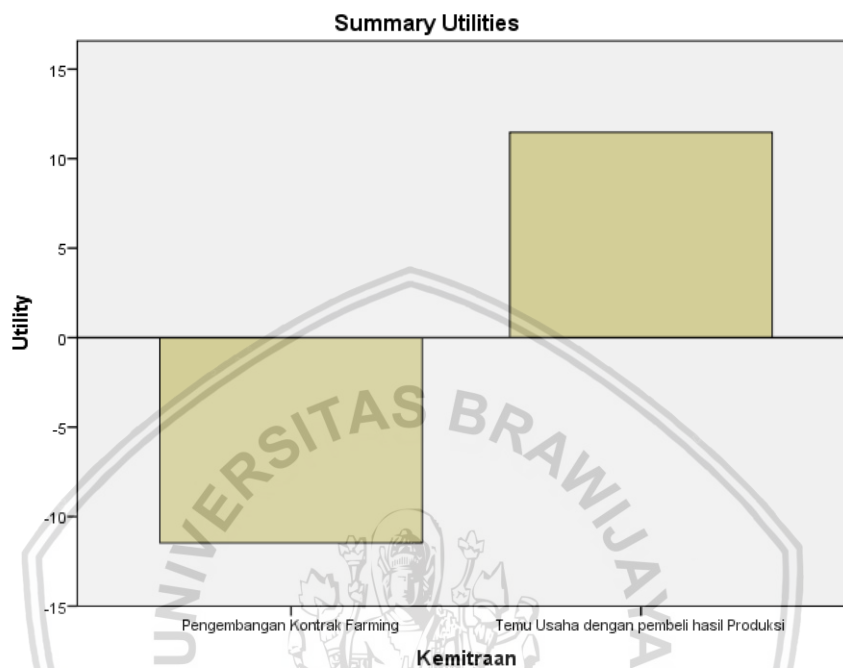
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016, pemerintah menugaskan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Stabilisasi harga Pangan pada tingkat produsen, dilaksanakan dengan pembelian Pangan oleh Perum BULOG dengan Harga Acuan atau HPP di gudang Perum BULOG, dalam hal rata-rata Harga Pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan atau HPP. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis pangan yang menjadi Cadangan Pangan Pemerintah termasuk cadangan beras Pemerintah, dan keperluan untuk golongan tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2016). Namun peran Bulog di kabupaten Nganjuk terhadap komoditas jagung masih kurang dalam mengatasi stabilisasi harga., maka diperlukan peran aktif Bulog untuk dapat menstabilkan harga komoditas jagung di kelurahan Warujayeng.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi (2009), apabila Bulog akan mengambil peran dalam perdagangan jagung, yang terbaik adalah penugasan pemerintah kepada BULOG untuk membeli jagung petani sebagaimana penugasan membeli gabah/beras petani. Jika bukan merupakan penugasan, Bulog harus mempunyai modal yang kuat dan sumber daya yang mampu bersaing dengan para pedagang pengumpul besardi lapangan, serta mengakarsampai ke petani. Sehingga petani dapat mendapat kepastian terkait hasil panen yang diproduksinya.

3) Faktor Kemitraan

Hasil Preferensi pada Aspek Kemitraan dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.

Gambar 5. Hasil Analisis Preferensi Aspek Kemitraan



Sumber : Data Sekunder, Diolah (2018)

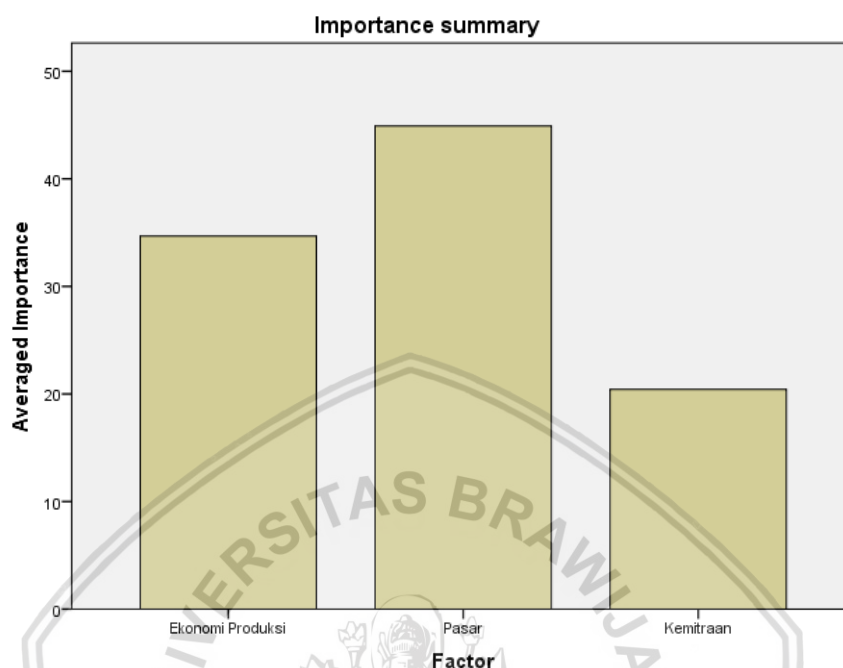
Pada penelitian ini atribut yang digunakan dalam Aspek Kemitraan terdiri dari dua atribut yaitu (1) Pengembangan Kontrak Farming dan (2) Temu Usaha dengan Pembeli Hasil Produksi. Hasil Preferensi menggunakan analisis Konjoin terhadap faktor Kemitraan diperoleh hasil bahwa atribut Pengembangan Kontrak Farming dengan nilai utilitas -11,466 merupakan atribut yang kurang diprioritaskan dalam Aspek Kemitraan karena nilai utilitas bernilai negatif. Hal tersebut sesuai dengan keadaan dilapang bahwa apabila kebijakan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan keadaan petani di Kelurahan Warujayeng, karena sebagian besar petani merupakan petani penyewa dan penggarap dan para petani tersebut melakukan sewa lahan tiap satu tahun sekali sesuai kontrak dengan pemilik lahan. Sehingga atribut tersebut bukan menjadi prioritas utama petani.

Hasil penelitian pada atribut Temu Usaha dengan Pembeli Hasil Produksi diperoleh nilai utilitas 11,466 yang berarti bahwa atribut tersebut merupakan atribut yang diprioritaskan petani dalam aspek faktor Kemitraan karena nilai utilitas atribut bernilai positif. Hal tersebut sesuai dengan keadaan dilapang, dimana dengan adanya pertemuan antara petani/pelaku agribisnis lainnya dengan pengusaha dan institusi terkait maka akan meningkatkan jaringan pemasaran terhadap produk yang dibudidayakan petani tersebut. Sehingga petani tidak hanya menjual hasil panennya kepada tengkulak. Oleh karena itu atribut ini menjadi prioritas utama petani pada aspek kemitraan.

Sejalan dengan pernyataan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (2013), temu usaha adalah pertemuan antara petani/pelaku agribisnis lainnya dengan pengusaha dan institusi terkait untuk meningkatkan kesempatan promosi/transaksi terkait bidang teknologi, produk pertanian dan hasil ikutannya, sarana produksi (Saprodi) pertanian, ataupun jasa yang dibutuhkan petani/pelaku agribisnis lainnya yang memiliki tujuan untuk mempromosikan teknologi pertanian dan meningkatkan transaksi dari Saprodi pertanian. Kegiatan pada temu usaha tersebut terdiri dari mendiskusikan peluang, masalah dan kendala yang ada dalam pengembangan agribisnis suatu komoditas yang merupakan topik diskusi, mendiskusikan jenis dan mutu teknologi, Saprodi pertanian dan atau produk pertanian maupun hasil ikutannya yang siap dipasarkan, serta usaha/pelayanan di bidang pertanian, mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam pengembangan agribisnis suatu komoditas yang merupakan topik diskusi dan lain-lain. Kegiatan temu usaha ini sangat dibutuhkan oleh petani di kelurahan warujayeng tidak hanya untuk dalam bidang pemasaran hasil produksinya, tetapi juga untuk menambah wawasan dan relasi dari banyak pelaku usaha di bidang agribisnis Nilai Kepentingan.

Hasil Preferensi Nilai Kepentingan pada setiap Aspek Kebijakan Pertanian, yaitu (1) Aspek Ekonomi Produksi, (2) Aspek Pasar, dan (3) Aspek Kemitraan dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6. Hasil Analisis Preferensi Nilai Kepentingan
Aspek Kebijakan Pertanian



Sumber : Data Sekunder, Diolah (2018)

Hasil preferensi menggunakan analisis Konjoin diperoleh tingkat kepentingan dari setiap Aspek Kebijakan Pertanian, yaitu Aspek Ekonomi Produksi dengan nilai kepentingan sebesar 34,669, Aspek Pasar dengan nilai kepentingan sebesar 44,909, dan Aspek Kemitraan dengan nilai kepentingan sebesar 20,421. Dari hasil tersebut Aspek utama yang diperhitungkan dalam Aspek Kebijakan Pertanian di Kelurahan Warujayeng adalah Aspek Pasar dengan nilai kepentingan tertinggi. Hal tersebut sesuai karena pada hasil preferensi petani didapatkan nilai utilitas tertinggi pada atribut Aspek Pasar. Pada penelitian ini atribut yang digunakan pada aspek pasar, yaitu Kebijakan Tunda Jual, Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian, dan Pengadaan Pasar Komoditas. Atribut yang lebih diprioritaskan oleh petani di kelurahan Warujayeng yaitu Kebijakan Tunda Jual dan Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian.

Kedua atribut aspek pasar yang menjadi prioritas petani jagung di kelurahan warujayeng saling berhubungan satu sama lain. Petani dapat menghindari kerugian akibat turunnya harga saat panen raya dengan melakukan

tunda jual. Namun hal tersebut tidak mudah dilakukan karena petani memerlukan uang tunai secara segera, baik untuk modal tanam berikutnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi dampak negatif akibat tertekannya harga saat panen raya, salah satunya pada komoditas jagung, yaitu dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pentingnya aspek pasar, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2011), untuk dapat meningkatkan pendapatan petani, pemerintah dapat memperbaiki sistem pasar yang ada saat ini untuk membantu petani dalam mengatasi permasalahan dalam aspek pasar. Kedua atribut kebijakan dari aspek pasar tersebut dibutuhkan oleh para petani di kelurahan Warujayeng dibuktikan dengan hasil nilai utilitas yang bernilai positif yang berarti atribut tersebut diprioritaskan petani.

4) Hasil Korelasi *Pearson's R* dan *Kendall's tau*

Hasil analisis Konjoin, uji ketepatan prediksi terhadap hasil konjoin merupakan proses pengujian untuk mengetahui apakah prediksi yang telah dilakukan mempunyai ketepatan yang tinggi. Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran output korelasi secara *Pearson's R* dan *Kendall's tau*. Pada pengukuran tersebut akan diketahui seberapa kuat hubungan antara *estimates* dan *actual* atau seberapa tinggi *predictive accuracy*. Untuk hasil dari Korelasi *Pearson's R* dan *Kendall's tau* didapatkan dari perhitungan dari aplikasi SPSS yang dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Korelasi *Pearson's R* dan *Kendall's tau*

	Value	Sig.
<i>Pearson's R</i>	.978	.000
<i>Kendall's tau</i>	.986	.000

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa hasil korelasi yang didapatkan dari pemanfaatan aplikasi SPSS untuk nilai *Pearson's R* yaitu memiliki nilai 0,978 dan nilai *Kendall's tau* memiliki nilai 0,986 ,karena keduanya memiliki nilai yang diatas dari 0,05, berarti bahwa nilai keduanya saling berkorelasi secara positif. Sehingga menunjukkan nilai korelasi yang kuat. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2011) bahwa dalam pedoman untuk memberikan intepretasi pada korelasi antara nilai 0,80 hingga 1,00 menunjukkan angka

korelasi yang sangat kuat dalam menunjukkan hubungan antara preferensi dengan data yang didapatkan.

Pada uji signifikansi keduanya memiliki nilai 0,000, yang berarti bahwa nilai tersebut memiliki korelasi yang kuat karena dibawah 0,05. Menurut Hair (2010), semakin tinggi korelasinya maka semakin cocok atau semakin baik modelnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi yang nyata dari hasil perhitungan menggunakan analisis konjoin dengan pendapat petani atau preferensi petani.

5.4 Kombinasi atribut terbaik dari masing-masing aspek kebijakan pertanian hasil preferensi petani jagung yang lebih diprioritaskan petani.

Dari hasil preferensi menggunakan analisis Konjoin, kombinasi atribut terbaik dari Aspek Kebijakan Pertanian Hasil Preferensi Petani Jagung di kelurahan Warujayeng yaitu atribut Kebijakan Harga Hasil Pertanian, Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian dan Temu Usaha dengan Pembeli Hasil Produksi. Hal tersebut dikarenakan bukan hanya dari hasil nilai utilitas yang tertinggi, tetapi hal tersebut juga sesuai dengan kondisi lapang di kelurahan Warujayeng.

Dari hasil penelitian menggunakan analisis Konjoin, tingkat kepentingan dari setiap Aspek Kebijakan Pertanian yang dipilih penulis, yaitu Aspek Ekonomi Produksi dengan nilai kepentingan sebesar 34,669, Aspek Pasar dengan nilai kepentingan sebesar 44,909, dan Aspek Kemitraan dengan nilai kepentingan sebesar 20,421. Dari hasil tersebut Aspek utama yang diperhitungkan dalam Aspek Kebijakan Pertanian di Kelurahan Warujayeng adalah Aspek Pasar dengan nilai kepentingan tertinggi.

Pada Aspek Pasar, dengan atribut yang paling disenangi yaitu Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian. Apabila pemerintah dapat memperbarui Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian pada komoditas jagung, maka akan dapat meningkatkan pendapatan petani jagung, dan juga dapat meningkatkan produksi jagung. Karena di kelurahan Warujayeng banyak petani yang memilih untuk mengganti komoditas pada musim tanam ketiga, yang semula jagung menjadi padi. Petani dalam melakukan usahatani melakukan penentuan komoditi apa yang akan diusahakan untuk memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Setiap petani berusaha agar hasil panen banyak dan memberi keuntungan yang besar sehingga petani sebagai pengambil keputusan memiliki kesempatan untuk memilih usahatani yang diperkirakan dapat memberikan keuntungan yang besar untuk diusahakan. Dengan adanya peningkatan pendapatan petani, maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan petani. Dengan meningkatnya kesejahteraan petani, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Sejalan dengan pernyataan Ilham (2008), bahwa Keberhasilan pembangunan suatu negara ditunjukkan oleh makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan petani di kelurahan Warujayeng, maka akan meningkatkan pula pembangunan pertanian di kecamatan Tanjunganom. Dan apabila tingkat kesejahteraan petani disetiap desa/kelurahan meningkat terus menerus akan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah sampai ke Kabupaten Nganjuk.

Pada penelitian ini faktor-faktor yang menentukan preferensi petani terhadap masing-masing atribut Kebijakan Pertanian, yaitu adalah kebutuhan petani, tingkat pengetahuan petani, dan juga pengalaman petani. Kebutuhan petani berupa kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan dalam usaha taninya. Kebutuhan pokok tersebut dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga petani. Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya orang yang berada dalam manajemen rumahtangga selain kepala rumahtangga. Hal ini akan berpengaruh terhadap pola produksi dan konsumsi petani serta mengakibatkan perbedaan pendapatan yang diterima oleh rumahtangga petani. Untuk kebutuhan usaha tani terdiri dari saprodi pertanian mulai dari awal penanaman hingga kebutuhan untuk panen dan pasca panen sampai pemasaran. Oleh karena itu kebutuhan mempengaruhi preferensi petani dalam memilih kebijakan pertanian.

Tingkat pengetahuan petani dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman petani itu sendiri. Taraf pendidikan petani yang rendah dapat menimbulkan beberapa implikasi yang dapat mengurangi tingkat respon petani terhadap usaha untuk mengembangkan pertanian (Mosher, A.T, 1987). Semakin tinggi tingkat pendidikan petani maka tingkat respon petani terhadap sesuatu juga tinggi dan

sebaliknya. Dimana hal tersebut juga mempengaruhi preferensi petani terhadap kebijakan pertanian.

Tingkat pengalaman petani terdiri dari lama profesi usaha tani dilakukan, keaktifan kegiatan penyuluhan. Inovasi baru dapat diterapkan oleh seorang petani jika ia telah mengetahui dan mengenal inovasi baru tersebut berdasarkan pengamatan dan pengalamannya sehari-hari. Menurut Mubyarto (1991) seseorang mampu menganalisis, mensintesa dan mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian pengetahuan seseorang tentang keadaan-keadaan dimana ia membuat keputusan juga mempengaruhi keputusan yang akan dibuatnya (Bishop dan Toussaint, 1989). Pengalaman berusahatani menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan usahatani. Pengalaman usahatani petani responden berkisar antara 1 – 25 tahun, dengan persentase tertinggi lebih dari 1 – 10 tahun sebesar 52.5%, dengan rata-rata pengalaman 9,15 tahun. Dari pengalaman tersebut, petani dapat merasakan ada tidaknya kebijakan yang diperoleh petani dari waktu ke waktu. Sehingga, tingkat pengalaman petani dapat mempengaruhi preferensi petani terhadap kebijakan pertanian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hutagalung (1994), bahwa terjadinya preferensi disebabkan karena beberapa faktor diantaranya, yaitu : (1) Kebutuhan, Preferensi seseorang terhadap suatu objek tertentu timbul karena harapannya bahwa objek tersebut dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkan. (2) Pengetahuan, Preferensi seseorang terhadap suatu objek yang telah dikenal serta diketahui dengan jelas cenderung lebih mudah timbul. dan (3) Pengalaman, Kesan tertentu yang diperoleh melalui pengalaman, merupakan faktor yang menentukan terbentuknya preferensi.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil analisis, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Preferensi menggunakan analisis konjoin didapatkan hasil bahwa pada aspek ekonomi produksi, atribut yang menjadi perioritas petani adalah atribut kebijakan harga hasil pertanian dan atribut pengembangan penanganan pasca panen. Hasil preferensi terhadap aspek pasar diperoleh hasil bahwa atribut yang menjadi perioritas petani adalah atribut kebijakan tunda jual dan atribut kebijakan pembelian hasil pertanian. Hasil preferensi pada aspek kemitraan, diperoleh hasil bahwa atribut yang menjadi perioritas petani adalah atribut temu usaha dengan pembeli hasil produksi.
2. Hasil preferensi menggunakan analisis konjoin didapatkan kombinasi atribut terbaik dari masing-masing aspek kebijakan pembangunan pertanian hasil preferensi petani jagung di kelurahan warujayeng yaitu atribut kebijakan harga hasil pertanian, kebijakan pembelian hasil pertanian dan temu usaha dengan pembeli hasil produksi.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian terhadap topik terkait adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan pertama dan kedua terkait hasil preferensi petani jagung terhadap kebijakan pertanian menggunakan analisis Konjoin dan kombinasi atribut terbaik dari Aspek Kebijakan Pertanian Hasil Preferensi Petani Jagung di kelurahan Warujayeng, maka dapat diajukan saran yaitu sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli jagung petani dengan harga yang bersaing sehingga dapat menstabilkan harga jagung di Kabupaten Nganjuk. Saran selanjutnya yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk untuk dapat meningkatkan keaktifan program penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait pengembangan penanganan pasca panen dan tunda jual

2. Saran selanjutnya yaitu untuk peneliti yang akan melakukan penelitian terkait preferensi terhadap kebijakan pembangunan pertanian di kabupaten Nganjuk untuk dapat memperbanyak atribut aspek kebijakan pembangunan pertanian terutama pada aspek pasar dan aspek kemitraan terhadap komoditas jagung disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada pada saat waktu penelitian berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

- A.T. Mosher. (1968). Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta : Jayaguna.
- Abdul Solihin, Wahab. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Acharya. (2014). Analisis Kebijakan Harga Pada Komoditas Pertanian. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri. Jakarta.
- Agustian, Adang. (2012). Kebijakan Harga Output dan Input untuk Meningkatkan Produksi Jagung. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian. Bogor.
- Antara, Made. (2009). Pertanian, Bangkit atau Bangkrut?. Arti Foundation. Denpasar.
- Ardiani,Novi. (2009). Rantai Pasokan Jagung di Daerah Sentra Produksi Indonesia. Jurnal Pangan Pusat Riset dan Perencanaan Strategis Perum BULOG.
- Ari Susanti, Etika. (2013) Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian. Malang, Universitas Brawijaya.
- Arifin, Bustanul. (2005). Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Jakarta : Grasindo.
- Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. STIE YKPN,Yogyakarta.
- Badan Litbang Pertanian. (2013). Temu Usaha. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk. (2010). Kabupaten Nganjuk Dalam Angka. *nganjukkab.bps.go.id*. Nganjuk : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2012). Jawa Timur Dalam Angka 2012. BPS Provinsi Jawa Timur. Tersedia di www.jatim.bps.go.id, diakses pada 10 Desember 2017.
- Bekele, Wagayehu. (2007). *Farmers' Preferences for Development Intervention Programs: A Case Study of Subsistence Farmers from East Ethiopian Highlands*. International Conference on African Development Archives. Paper 124.
- Dinas Pertanian Kab. Nganjuk. (2014). Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2014-2018. Nganjuk : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
- Eaton and Shepherd. (2001). Contract Farming Partnerships for Growth. FAO Agricultural Services Bulletin 145. Roma.

- Erman. (2012). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Ernita. (2017). Preferensi Konsumen dan Strategi Pemasaran Puree Bayam Organik. Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hair, J.K., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2010). *Multivariate Data Analysis Seventh Edition*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Haryono. (2014). Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Hasyim, H. (2006). Analisis Hubungan Karakteristik Petani Kopi Terhadap Pendapatan (Studi Kasus : Desa Dolok Seribu Kecamatan Paguran Kabupaten Tapanuli Utara). Jurnal Komunikasi Penelitian. Lembaga Penelitian. USU. Medan.
- I. G. P, Sarasutha. (2002). Kinerja Usahatani dan Pemasaran Jagung di Sentra Produksi. Jurnal Litbang Pertanian Vol. 21. No.2. hlm 38 – 47.
- I.U. Firmansyah, M. Aqil, dan Yamin Sinuseng. (2011). Teknik Produksi dan Pengembangan Penanganan Pascapanen Jagung. Balai Penelitian Tanaman Sereal, Maros.
- Iqbal, M dan T. Sudaryanto. (2008). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 6 Nomor 2, Juni 2008.
- Jhingan. (2012). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: RajaGrafindo
- Kartasapoetra, A.G. (2014). Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Karwan, A. Salikin. (2003). Sistem Pertanian Berkelanjutan. Kanisius, Yogyakarta.
- Kementan. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Jakarta : Kementrian Pertanian RI.
- Kusuma, Pungky Puja. (2006). Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Bunga dan Hubungannya dengan Pendapatan. Fakultas Pertanian USU. Medan.
- Listiani Nurlia dan Bagas Haryotejo. (2013). Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung . Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi. Volume 7 No.2.
- Lubis, N, L. (2000). Adopsi Teknologi dan Faktor yang Mempengaruhinya. USU Press. Medan.
- Martodireso. (2002). Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani. Kanisius, Yogyakarta.
- Mayrowani, Henny. (2006). Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian . Litbang Pertanian.
- Meier, M.G. (1995). *Leading Issues in Economics Development*. Sixth Edition, Mc. Graw Hill, International Edition Finance Series, Singapore.

- Muhi, H. A. (2011). *Fenomena Pembangunan Desa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat.
- Mulyono, D. (2010). *Kapasitas Tunda Jual Petani Padi*. Penerbit: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Sindangbarang. Bogor
- Munadi, Muhammad Jurnal. (2008). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Bidang Pendidikan di Kota Surakarta*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No.2 Tahun XII.
- Negara, S. (2000). *Difusi Inovasi Fakultas Pertanian USU*. Medan.
- Orazem, Peter F, Otto, Daniel M, and Edelman, Mark A. (1988). *An Analysis of Farmers Agricultural Policy Preferences*. Iowa State University. Economic Staff Paper Series. 185.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
- Piliang, Indra J. (2003). *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. Jakarta
- Pradopo, R. D. (2010). *Pengkajian puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pusbangprodik. 2012. *Pedoman Penyusunan Modul*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan SDMPK dan PMP.
- Pranadji. (2003). *Peran Kewirausahaan Dan Kelembagaan (Kemitraan) Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan*. Makalah Disampaikan Pada Simposium Penelitian Tanaman Pangan IV, Bogor, 22-24 Nopember 1999 . Pusat Penelitian Tanaman Pangan. Bogor.
- Rahmana, Arief. (2008). *Kemitraan Usaha dan Masalahnya*. Fakultas Teknik Universitas Widyatama; Bandung.
- Sarasuta, I. P. (2002). *Kinerja usaha tani dan pemasaran jagung di sentra produksi*. Jurnal Litbang Pertanian. 21 (2) : 39-47.
- Sari, D.P., Prastawa, H., Lintang, D. (2010). “Analisis Kepentingan Atribut Perpustakaan Berbasis Riset Melalui Metode Conjoint Analysis” dalam jurnal Teknik Industri. Vol V No. 2 Mei 2010.
- Semaoen, Iksan. (1999). *Ekonomi Produksi Pertanian : Teori dan Aplikasi*. ISEI. Jakarta.
- Silfani, Yudith. (2018). *Kelembagaan, Kemitraan, dan Manajemen Resiko Agribisnis*.

- Simatupang, P. (1997). Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Melalui Strategi Keterkaitan Berspektrum Luas. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Soekartawi. (2003). Prinsip Ekonomi Pertanian. Rajawali Press. Jakarta.
- Soekartawi, (2003). Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisa Fungsi Cobb-Douglas. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekartawi, et al. (1984). Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. Jakarta : UI Press.
- Sri sudalmi, Endang. (2010). Jurnal Inovasi Pertanian Vol.9, No. 2, (15 -28)
- Subandi. (2012). Ekonomi Pembangunan. Bandung: AlfaBeta
- Sudaryanto, Tahlim dan Rusastra, I Wayan. (2006). Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Sukirno, Sadono. (2002). Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.
- Sumaryanto. (2009). Diversifikasi Sebagai Salah Satu Pilar Ketahanan Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 27 (2): 93-108.
- Suseno, Djoko dan Suyatna, Hempri, (2006). Quo Vadis Petani Indonesia! Terhempasnya Anak Bangsa Dari Sektor Pertanian Yogyakarta: Aditya Media.
- Syafa'at, N., A. Purwoto, M. Maulana, dan C. Muslim. (2006). Analisis Besaran Subsidi Pupuk dan Pola Distribusinya. Laporan Akhir Penelitian, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (amandemen).
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.





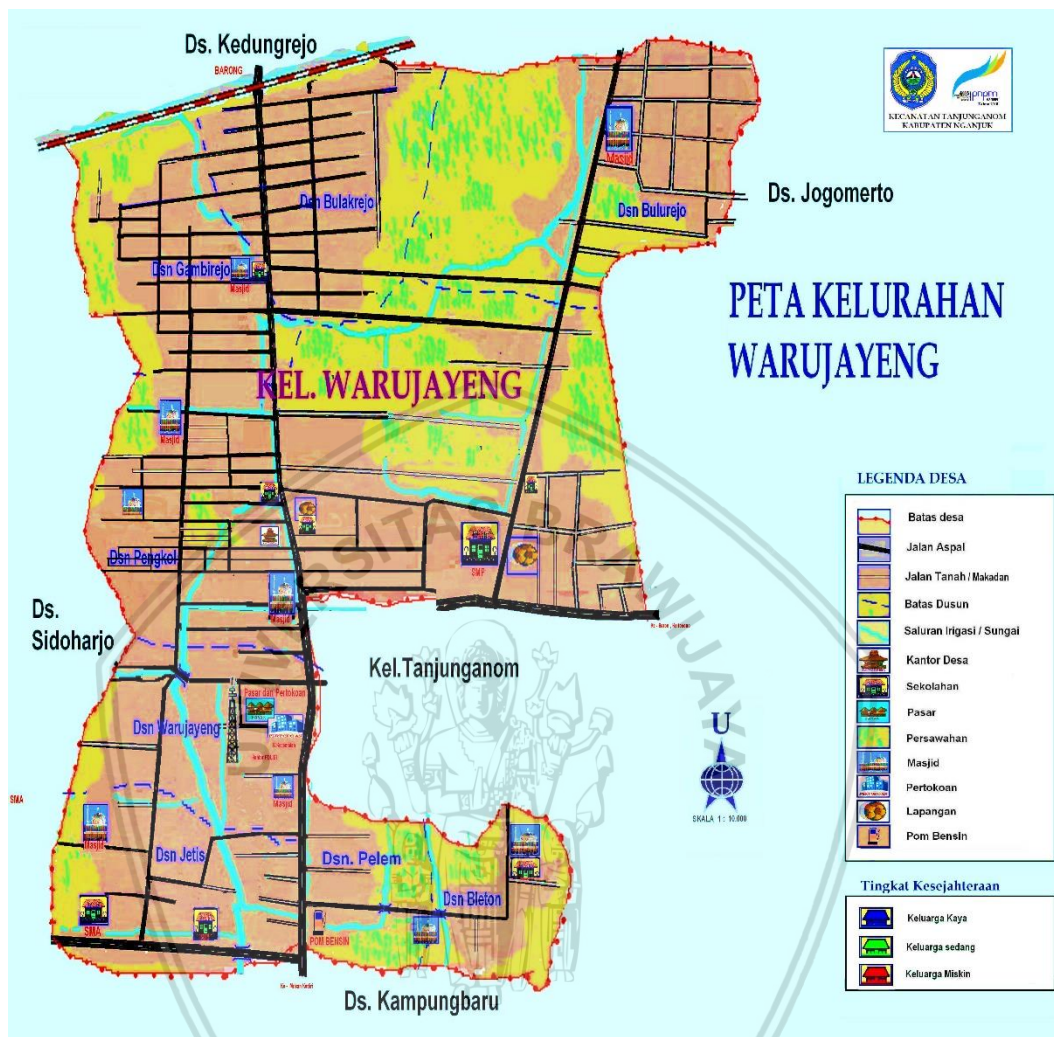
Lampiran 1. Data Pendukung**1. Data Produktivitas (kw/ha) Jagung di Kabupaten Nganjuk 2014-2016**

No.	Kecamatan	Produktivitas		
		2014	2015	2016
1.	Sawangan	65	71,02	59,47
2.	Ngetos	61,1	45,05	61,22
3.	Berbek	66,8	65,42	66,47
4.	Loceret	64	72,31	70,84
5.	Pace	71	75,47	68,22
6.	Tanjunganon	86	71,02	70,59
7.	Prambon	11,4	65,57	76,09
8.	Ngronggot	86	83,48	68,48
9.	Kertosono	69	63,49	62,09
10.	Patianrowo	63,5	42,03	68,48
11.	Baron	74	78,01	62,09
12.	Gondang	79	66	68,22
13.	Sukomoro	71	78,24	75,21
14.	Nganjuk	76	85,33	60,34
15.	Bagor	74	85,41	66,47
16.	Wilangan	75	80	74,34
17.	Rejoso	76,2	80,02	77,84
18.	Ngluyu	56	42	54,22
19.	Lengkong	44,9	60,04	62,09
20.	Jatikalen	45	68	41,1
Jumlah		1314,9	1377,91	1333,1

2. Data Produktivitas (kw/ha) Jagung di Kecamatan Tanjunganom Tahun 2015-2016

No.	Desa/Kelurahan	Produktivitas (kw/ha)	
		2015	2016
1.	Kedung Ombo	80	80
2.	Sumber Kepuh	80	80
3.	Kampung Baru	80	79
4.	Wates	70	70
5.	Malangsari	79	80
6.	Getas	80	79
7.	Sonobeket	75	75
8.	Ngadirejo	75	75
9.	Banjaranyar	76	75
10.	Sidoharjo	75	75
11.	Tanjunganom	75	75
12.	Jogomerto	79	80
13.	Warujayeng	80	76
14.	Kedungrejo	70	70
15.	Sambirejo	70	70
16.	Demongan	70	70
Total		1214	1209

3. Peta Kelurahan Warujayang



Lampiran 2. Prosedur Perhitungan Sampel

Metode penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* dan diukur dengan menggunakan rumus Parel *et al.* (1973) sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2\sigma^2}{Nd^2 + Z^2\sigma^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel minimum

N = jumlah populasi

Z = nilai ditingkat kepercayaan tertentu, yaitu 95% (dengan nilai sebesar 1.96)

σ^2 = nilai varians dari populasi

d = kesalahan maksimum yang ditoleransi (5%)

Sebelum mengukur jumlah sampel minimal yang harus diambil dari total populasi, dilakukan pengukuran nilai varians dari sampel (s^2) dengan rumus sebagai berikut:

$$s^2 = \frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

Keterangan:

n = populasi kecil (20 petani)

X = luas lahan yang dimiliki setiap petani

Luas lahan yang dimiliki setiap petani, yaitu:

0,75; 0,25; 0,25; 0,25; 0,5; 0,5; 0,25; 0,25; 0,25; 0,5; 0,25; 0,5; 0,75; 0,25; 0,5; 0,5;
0,25; 0,5; 0,25; 0,25

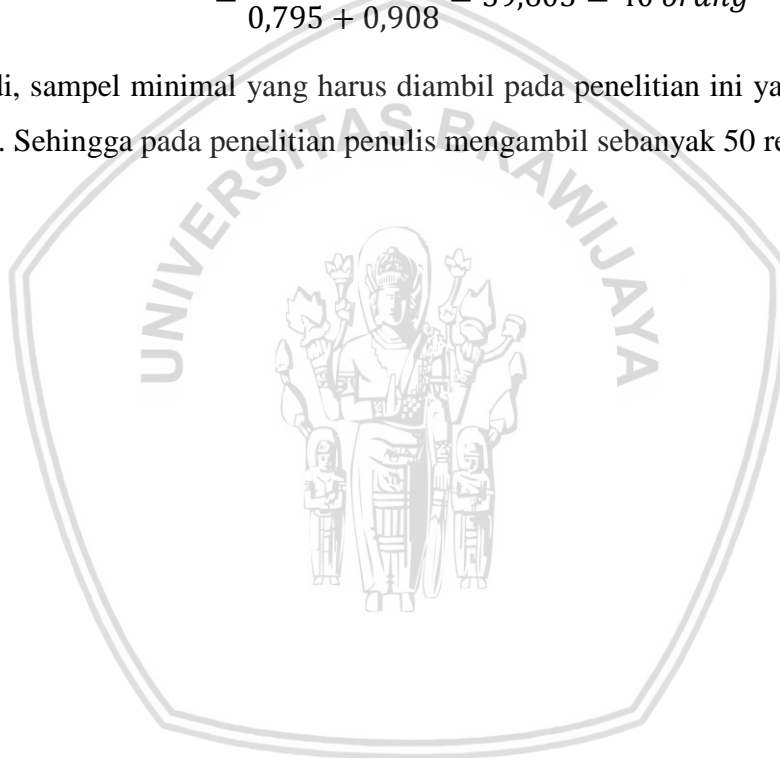
Oleh karena itu, pengukuran untuk sampel varians sebagai berikut:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{20 \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}{20(20-1)} \\ &= \frac{20 \cdot 3,56 - (7,75)^2}{20(19)} \\ &= \frac{71,25 - 80,06}{380} \\ &= \frac{11,19}{380} = 0,029 \end{aligned}$$

Setelah itu, dilakukan pengukuran jumlah sampel minimal yang harus diambil dari total populasi (n) sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{NZ^2\sigma^2}{Nd^2 + Z^2\sigma^2} \\ &= \frac{318 \cdot 1,96^2(0,029)}{318 \cdot (0,05)^2 + 1,96^2 \cdot 0,029} \\ &= \frac{318(3,84) \cdot 0,029}{318 \cdot (0,05)^2 + 1,96^2 \cdot 0,029} \\ &= \frac{35,96}{0,795 + 0,908} = 39,605 = 40 \text{ orang} \end{aligned}$$

Jadi, sampel minimal yang harus diambil pada penelitian ini yaitu sebanyak 40 orang. Sehingga pada penelitian penulis mengambil sebanyak 50 responden.



Lampiran 3. Data Nama Responden

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Status Lahan	Produksi Terakhir (kw)	Luas Lahan (ha)	Produktivitas Jagung (kw/ha)
1.	Karno	L	46	SMP	Pemilik dan Penggarap	25	0,25	100
2.	Nur Wahyudi	L	50	SMA	Pemilik dan Penggarap	12	0,25	48
3.	Supri	L	32	SMP	Pemilik dan Penggarap	12	0,25	48
4.	Imam Zuddi	L	60	SD	Penyewa dan Penggarap	26	1,75	14,86
5.	Sudarto	L	55	SMP	Pemilik dan Penggarap	50	0,5	100
6.	Ridwan	L	41	SMP	Penggarap Bagi Hasil	20	1,75	11,43
7.	H. Muslim	L	56	SD	Pemilik dan Penggarap	10	1	10
8.	Suguh	L	60	SMP	Penyewa dan Penggarap	15	1	15
9.	Imam Muslik	L	47	SD	Pemilik dan Penggarap	50	1	50
10.	Sulton	L	62	Tidak tamat SD	Pemilik dan Penggarap	12	1	12
11.	Sujarwo	L	43	SMP	Penyewa dan Penggarap	23	0,5	46
12.	Kusdi	L	70	SD	Penilik dan Penggarap	23	0,5	46
13.	Sirof	L	49	SD	Penyewa dan Penggarap	13	0,25	52
14.	Sugeng	L	56	SD	Penyewa dan Penggarap	13	0,25	52
15.	Maryanto	L	49	SMP	Pemilik dan Penggarap	25	0,5	50

Lanjutan Tabel

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Status Lahan	Produksi Terakhir (kw)	Luas Lahan (ha)	Produktivitas Jagung (kw/ha)
16.	Sokip	L	52	SD	Penyewa dan Penggarap	30	0,5	60
17.	Hariyanto	L	46	SMP	Penyewa dan Penggarap	25	0,5	50
18.	Suyono	L	66	SD	Penyewa dan Penggarap	15	0,25	60
19.	Yudi Santoso	L	39	SMA	Penyewa dan Penggarap	15	1	15
20.	Suyanto	L	51	SD	Penyewa dan Penggarap	35	0,5	70
21.	Gufron	L	50	SMA	Penyewa dan Penggarap	14	0,25	56
22.	Sumarwan	L	48	SD	Pemilik dan Penggarap	14	0,25	56
23.	Masnuri	L	44	SD	Pemilik dan Penggarap	14	0,25	56
24.	Zainudin	L	45	SD	Pemilik dan Penggarap	24,5	0,5	49
25.	Warsidi	L	56	SD	Pemilik dan Penggarap	10,75	0,25	43
26.	Jazuli	L	59	SMP	Pemilik dan Penggarap	18	0,25	72
27.	Suraji	L	54	SD	Penyewa dan Penggarap	37,5	0,75	50
28.	Nursalim	L	48	SD	Penyewa dan Penggarap	12	0,25	48
29.	M. Solikin	L	51	SD	Penyewa dan Penggarap	15	0,25	60
30.	Sugiyanto	L	51	SMP	Penyewa dan Penggarap	15	0,25	60

Lanjutan Tabel

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Status Lahan	Produksi Terakhir (kw)	Luas Lahan (ha)	Produktivitas Jagung (kw/ha)
31.	Hono	L	43	SMA	Penggarap Bagi Hasil	10	0,25	40
32.	Samingan	L	48	SD	Penggarap Bagi Hasil	20	0,5	40
33.	Subadri	L	52	SD	Penyewa dan Penggarap	20	0,75	26,67
34.	Zainal Arifin	L	47	SMA	Penyewa dan Penggarap	12	1,25	9,6
35.	Kukuh Prioutomo	L	25	SMA	Pemilik dan Penggarap	50	1	50
36.	Yudis	L	45	SD	Penyewa dan Penggarap	15	0,25	60
37.	Sugiyanto	L	60	SD	Penyewa dan Penggarap	14	0,25	56
38.	Suwardi	L	56	SMP	Penyewa dan Penggarap	11	0,25	44
39.	Mustar	L	49	SMP	Penyewa dan Penggarap	11,25	0,25	45
40.	Turyat	L	60	SD	Pemilik dan Penggarap	23,75	0,5	47,5

Lanjutan Tabel

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Status Lahan	Produksi Terakhir (kw)	Luas Lahan (ha)	Produktivitas Jagung (kw/ha)
41.	Hendrawan	L	47	SD	Penyewa dan Penggarap	11	0,25	40
42.	Darmanto	L	45	SD	Penyewa dan Penggarap	20	0,5	40
43.	Supriadi	L	48	SD	Penyewa dan Penggarap	10	0,25	44
44.	Subaidi	L	47	SD	Penyewa dan Penggarap	12	1,25	9,6
45.	Ahmad Yusuf	L	55	SMA	Penyewa dan Penggarap	50	1	50
46.	Sugitomo	L	65	SD	Penyewa dan Penggarap	11	0,25	45
47.	Sutaryat	L	60	SD	Penyewa dan Penggarap	12	0,25	56
48.	Sumaidi	L	58	SD	Penyewa dan Penggarap	11	0,25	45
49.	Soemardi	L	54	SMP	Penyewa dan Penggarap	11	0,25	45
50.	Abdul Toha	L	64	SD	Penyewa dan Penggarap	20	0,5	40

Lampiran 4. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

PREFERENSI PETANI TERHADAP KEBIJAKAN PERTANIAN

Komoditas

0.1. No. Kuisisioner

0.2. Enumerator

0.3. Tanggal

0.4. Provinsi

0.5. Kabupaten/Kota

0.6. Kecamatan

0.7. Desa/Kelurahan

0.8. Dusun/ RT/ RW

:						
:						
:						
:	DD		MM		YY	
:						
:						
:						
:						
:						

I. IDENTITAS RUMAH TANGGA (RTG)

1.1. Nama Kepala RTG

1.2. Jenis kelamin KRTG

1.3. Usia KRTG

1.3.a Jenis Petani

(isi 1=ya, 0=tidak)

1.3.b Luas lahan diusahakan

1.4. Pendidikan KRTG

:			
:	1 Laki-laki/ 2 Perempuan		
:		Tahun	
:		a. Pemilik dan Penggarap	
:		b. Penyewa dan Penggarap	
:		c. Penggarap bagi hasil	
:		d. Lainnya	

Keterangan: 1 = Tidak sekolah; 2= Tidak tamat SD;

3 = Tamat SD; 4 = Tamat SMP; 5= Tamat SMA;

6 = Tamat D3; 7= Sarjana/lebih tinggi

Lampiran 4. (Lanjutan)

II. Physical Capital --> Infrastructure

III.

2.1 Kepemilikan aset fisik

pribadi

			Luas	Status *)			
A	Lahan	a	Lahan sawah	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/>	Keterangan *) : <i>Milik = 1</i> <i>Sewa = 2</i> <i>Hibah = 3</i> <i>Kerjasama = 4</i>	
		b	Lahan tegal	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/>		
		c	Lahan pekarangan	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/>		
		d	Lahan hutan	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/>		
B	Air bersih	e	Sumber air bersih	<input type="text"/>	Keterangan isian e: 5 = PDAM 4 = Sumur terlindung 3 = sumber air langsung 2 = air hujan	Keterangan isian f: 5 = Melimpah 4 = Cukup 3 = Kurang 2 = Sangat kurang 1 = Tidak ada	
		f	Ketersediaan	<input type="text"/>			
				<input type="text"/>			
C	Listrik	g	Ketersediaan	<input type="text"/>			
D	Transportasi		Jumlah (unit)				
		h	Sepeda	<input type="text"/>	k	Truk	<input type="text"/>
		i	Sepeda motor	<input type="text"/>	l	Pickup	<input type="text"/>
		j	Mobil	<input type="text"/>			1=ada; 0=tidak
E	Komunikasi	m	TV	<input type="text"/>	p	Komputer	<input type="text"/>
		n	Radio	<input type="text"/>	q	Koneksi Internet	<input type="text"/>
		o	Handphone	<input type="text"/>			
				<input type="text"/>			
F	Alat mesin pertanian:	r	Traktor	<input type="text"/>	v	Tangki Sprayer	<input type="text"/>

Lampiran 4. (Lanjutan)

		s	Mesin Diesel		w	Mesin penggilingan	
		t	Cangkul				
		u	Sabit				
G	Rumah tinggal	w	Luas tanah total		m ²		
		x	Status				
		y	Dinding terluas				
		z	Lantai rumah				

2.2. Aset fisik public dan private

	X	Y
A	Pendidikan	
B	Puskesmas/Rumah sakit	
C	Pasar Rakyat	
D	Koperasi	
E	Bank	
F	Toko Alat pertanian	
G	Kelompok tani	

Keterangan:

Nilai	Status rumah	Dinding	Lantai
5	Milik	Keramik	Total Keramik
4	Sewa/Kontrak	Tembok	Sebagian Banyak Semen
3	Dinas	Kayu	Banyak tanah
2	Menumpang	Bambu	Total tanah
1	Lainnya	Triplek	

Freq menggunakan (X)		Persepsi (Y)
Sgt sering	5	Sgt mudah
Sering	4	Mudah
agak	3	Cukup
kurang	2	Kurang
tdk pernah	1	Sangat sulit

Lampiran 4. (Lanjutan)

III. Financial Capital

3.1. Pernahkah mengalami kesulitan dalam pembiayaan berikut di 1 tahun terakhir ini?

- a. Usahatani
b. Kesehatan
c. Pendidikan
d. Keperluan pangan
e. Keperluan energy

Y	Z

Y-frekuensi:

	Sgt
1	sering
2	sering
3	agak
4	kurang
	sgt
5	jarang

Nilai Z

	Sangat
1	membebani
2	Membebani
	Agak
3	membebani
	Tidak
4	membebani
5	Tidak tahu

3.2. Menabung untuk akumulasi modal dan berjaga-jaga

- Sumber
a. Usahatani
b. Perdagangan
c.
Peternakan/perkebunan

Y

- Sumber
d. Gaji bulanan
e. Kiriman anak
f. Sumber lain

Y

3.3. Bagaimanakah kemampuan akses keuangan RTG jika diperlukan?

- Sumber
a. Koperasi
b. Bank
c. Perusahaan

Y	Z

- Sumber
d. Saudara
e. Tetangga
f. Penggadaian

Y	Z

Lampiran 4. (Lanjutan)

IV. Networking

A Bagaimana tingkat kesulitan mendapatkan informasi berikut?

	Rate
a. Pendidikan	
b. Kesehatan	
c. Usaha produktif	
d. Budidaya tanaman	
e. Pekerjaan	

Keterangan:

Rate: 1 Sangat sulit
 2 Sulit
 3 Agak sulit
 4 Mudah
 5 Sangat mudah

B Tingkat hubungan antar petani

C Hubungan dengan kelembagaan local

D Keterlibatan dengan program-program pemerintah

E Kerjasama dengan perusahaan

F Kerjasama dengan lembaga di luar daerah

G Seberapa besar saudara mempercayai orang lain di desa berkaitan dengan hal ini?

a. Warung/Toko kebutuhan sehari

b. Penjual di toko pertanian

c. Pemimpin desa

d. Pemerintah kabupaten

e. Penyuluh pertanian

X	Y	Freq (X)	Isian keterangan (Y):
		<i>Sgt sering</i>	5 <i>sangat baik</i>
		<i>Sering</i>	4 <i>Baik</i>
		<i>agak</i>	3 <i>Kurang</i>
		<i>kurang</i>	2 <i>Sangat kurang</i>
		<i>tdk</i>	
		<i>pernah</i>	1 <i>Tidak Tahu</i>

Keterangan:

5 Sangat percaya 2 Kurang percaya
 4 Percaya 1 Tidak percaya
 3 Tidak tahu

V. KEBIJAKAN PERTANIAN

No	Nama Kebijakan/ Bantuan Pemerintah	Ada/Tidak (Ya=1; tidak=0)	KEMANFAATAN DIRASAKAN JIKA ADA KEBIJAKAN (5 Sangat sesuai - 1 sangat tidak sesuai)	KEBIJAKAN LEBIH DIINGINKAN (PREFERENSI) (5 sangat diinginkan - 1 sangat tidak diinginkan)
	POKOK KEBIJAKAN			
1	Aspek teknis produksi			
2	Aspek ekonomi produksi			
3	Aspek kelembagaan petani			
4	Aspek pasar			
5	Aspek kemitraan			
6	Aspek lingkungan			
	ASPEK TEKNIS PRODUKSI			
1	Kebijakan bantuan pupuk			
2	Kebijakan bantuan benih/bibit			
3	Kebijakan pembangunan irigasi			
4	Kebijakan bantuan alsintan			
5	Pembuatan pupuk organik			
6	Bantuan pupuk organik			
7	Pembuatan agen hayati			
8	Bantuan agen hayati			
9	Perbaikan tek. UT - Demo plot			
10	Perbaikan tek. UT – Penyuluhan			

	ASPEK EKONOMI PRODUKSI			
1	Bantuan kredit usahatani			
2	Kebijakan harga pupuk			
3	Kebijakan harga benih/bibit			
4	Kebijakan harga hasil pertanian			
5	Pengembangan penanganan pasca panen			
6	Regulasi alih fungsi lahan			
	ASPEK KELEMBAGAAN PERTANIAN			
1	Penguatan kelembagaan petani			
2	Pengembangan pertanian kawasan produksi			
3	Realisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan			
4	Pengembangan koperasi tani			
5	Pengembangan toko pertanian desa			
6	Pengembangan lumbung tani			
7	Pengembangan gudang tani			
	ASPEK PASAR			
1	Kebijakan tunda jual			
2	Kebijakan pembelian hasil pertanian pemerintah			
3	Kebijakan penyebaran informasi harga pertanian			
4	Pengadaan pasar komoditas			
5	Pasar pertanian on-line			

Lampiran 4. (Lanjutan)

	ASPEK KEMITRAAN			
1	Pengembangan kontrak farming			
2	Temu usaha dengan pembeli hasil produksi			
	ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN			
1	Kebijakan konservasi lahan			
2	Kebijakan konservasi air			
3	Penyelamatan keanekaragaman			



Lampiran 5. Analisis Konjoin

1. Perhitungan Stimuli

No. Responden	Pref1	Pref2	Pref3	Pref4	Pref5	Pref6	Pref7	Pref8	Pref9	Pref10	Pref11	Pref12
1	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
2	66.36	82.94	82.94	103.68	49.77	62.21	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
3	44.24	55.30	55.30	69.12	33.18	41.47	66.36	82.94	82.94	103.68	49.77	62.21
4	44.24	55.30	55.30	69.12	33.18	41.47	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
5	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
6	44.24	55.30	55.30	69.12	22.12	27.65	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
7	35.39	44.24	44.24	55.30	26.54	33.18	70.78	88.47	88.47	110.59	53.08	66.36
8	44.24	55.30	55.30	69.12	22.12	27.65	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
9	44.24	55.30	55.30	69.12	33.18	41.47	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
10	44.24	55.30	55.30	69.12	33.18	41.47	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
11	35.39	44.24	44.24	55.30	26.54	33.18	70.78	88.47	88.47	110.59	53.08	66.36
12	35.39	44.24	44.24	55.30	26.54	33.18	70.78	88.47	88.47	110.59	53.08	66.36
13	35.39	44.24	44.24	55.30	26.54	33.18	53.08	66.36	66.36	82.94	39.81	49.77
14	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24
15	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
16	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
17	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
18	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12

(lanjutan tabel perhitungan stimuli)

No. Responden	Pref13	Pref14	Pref15	Pref16	Pref17	Pref18	Pref19	Pref20	Pref21	Pref22	Pref23	Pref24
1	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	88.47	110.59	110.59	138.24	55.30	55.30
2	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68
3	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68
4	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68	110.59	138.24	138.24	172.80	66.36	103.68
5	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	88.47	110.59	110.59	138.24	55.30	55.30
6	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12
7	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94	88.47	110.59	110.59	138.24	82.94	82.94
8	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12
9	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68
10	110.59	138.24	138.24	172.80	82.94	103.68	110.59	138.24	138.24	172.80	66.36	103.68
11	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
12	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
13	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94	88.47	110.59	110.59	138.24	66.36	82.94
14	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
15	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
16	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
17	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
18	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30

(lanjutan tabel perhitungan stimuli)

No. Responden	Pref1	Pref2	Pref3	Pref4	Pref5	Pref6	Pref7	Pref8	Pref9	Pref10	Pref11	Pref12
19	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
20	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
21	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
22	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
23	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
24	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
25	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	35.39	44.24	44.24	55.30	17.69	22.12
26	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
27	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
28	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
29	12.44	62.21	15.55	77.76	6.22	31.10	12.44	62.21	15.55	77.76	6.22	31.10
30	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
31	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
32	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
33	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88	9.95	49.77	12.44	62.21	4.98	24.88
34	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
35	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
36	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47

(lanjutan tabel perhitungan stimuli)

No. Responden	Pref13	Pref14	Pref15	Pref16	Pref17	Pref18	Pref19	Pref20	Pref21	Pref22	Pref23	Pref24
19	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
20	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
21	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
22	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
23	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
24	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
25	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
26	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	16.59	82.94	20.74	103.68	6.64	41.47
27	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18
28	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	13.27	66.36	16.59	82.94	10.37	33.18
29	16.59	82.94	20.74	103.68	8.29	41.47	20.74	103.68	25.92	129.60	6.64	51.84
30	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18
31	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18
32	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18
33	13.27	66.36	16.59	82.94	6.64	33.18	13.27	66.36	16.59	82.94	10.37	33.18
34	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12
35	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12
36	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	44.24	69.12






(lanjutan tabel perhitungan stimuli)

No. Responden	Pref1	Pref2	Pref3	Pref4	Pref5	Pref6	Pref7	Pref8	Pref9	Pref10	Pref11	Pref12
37	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
38	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
39	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
40	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
41	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
42	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
43	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
44	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
45	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
46	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
47	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	66.36	82.94	82.94	103.68	33.18	41.47
48	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
49	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18
50	70.78	88.47	88.47	110.59	35.39	44.24	53.08	66.36	66.36	82.94	26.54	33.18

(lanjutan tabel perhitungan stimuli)

No. Responden	Pref13	Pref14	Pref15	Pref16	Pref17	Pref18	Pref19	Pref20	Pref21	Pref22	Pref23	Pref24
37	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	55.30	55.30
38	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12
39	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	44.24	69.12
40	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
41	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
42	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	55.30	55.30
43	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12
44	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	44.24	69.12
45	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
46	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	55.30	55.30
47	110.59	138.24	138.24	172.80	55.30	69.12	110.59	138.24	138.24	172.80	44.24	69.12
48	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
49	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30
50	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30	88.47	110.59	110.59	138.24	44.24	55.30

2. Hasil Perhitungan Kombinasi Atribut

	 Ekonomi Produksi	 Pasar	 Kemitraan	 STATUS_	 CARD_
1	1.00	1.00	1.00	.00	1.00
2	1.00	1.00	2.00	.00	2.00
3	1.00	2.00	1.00	.00	3.00
4	1.00	2.00	2.00	.00	4.00
5	1.00	3.00	1.00	.00	5.00
6	1.00	3.00	2.00	.00	6.00
7	2.00	1.00	1.00	.00	7.00
8	2.00	1.00	2.00	.00	8.00
9	2.00	2.00	1.00	.00	9.00
10	2.00	2.00	2.00	.00	10.00
11	2.00	3.00	1.00	.00	11.00
12	2.00	3.00	2.00	.00	12.00
13	3.00	1.00	1.00	.00	13.00
14	3.00	1.00	2.00	.00	14.00
15	3.00	2.00	1.00	.00	15.00
16	3.00	2.00	2.00	.00	16.00
17	3.00	3.00	1.00	.00	17.00
18	3.00	3.00	2.00	.00	18.00
19	4.00	1.00	1.00	.00	19.00
20	4.00	1.00	2.00	.00	20.00
21	4.00	2.00	1.00	.00	21.00
22	4.00	2.00	2.00	.00	22.00
23	4.00	3.00	1.00	.00	23.00
24	4.00	3.00	2.00	.00	24.00

3. SPSS Syntax Konjoin

```

CONJOINT PLAN ='Desty_Plan.sav'
/ DATA='Desty_Data.sav'
/ SCORE=Pref1 TO Pref24
/ SUBJECT=Name
/ FACTOR=EkonomiProduksi (DISCRETE) Pasar (DISCRETE) Kemitraan (DISCRETE)
/ PLOT=ALL
/ UTILITY='Desty_Hasil.sav'
/ PRINT=ALL
  
```


4. Nilai Utilities, Importance Values, dan Correlations

Utilities

		Utility Estimate	Std. Error
Ekonomi Produksi	Kebijakan Bantuan Kredit	-13.672	2.756
	Kebijakan Harga Pupuk	-18.035	2.756
	Kebijakan Harga hasil Pertanian	16.184	2.756
	Pengembangan Penanganan Pasca Panen	15.523	2.756
Pasar	Kebijakan Tunda Jual	5.471	2.250
	Kebijakan Pembelian Hasil Pertanian	25.822	2.250
	Pengadaan Pasar Komoditas	-31.293	2.250
Kemitraan	Pengembangan Kontrak Farming	-11.466	1.591
	Temu Usaha dengan Pembeli Hasil Produksi	11.466	1.591
(Constant)		75.934	1.591

Importance Values

Ekonomi Produksi	34.669
Pasar	44.909
Kemitraan	20.421

Averaged Importance Score

Correlations^a

	Value	Sig.
Pearson's R	.978	.000
Kendall's tau	.986	.000

a. Correlations between observed and estimated preferences

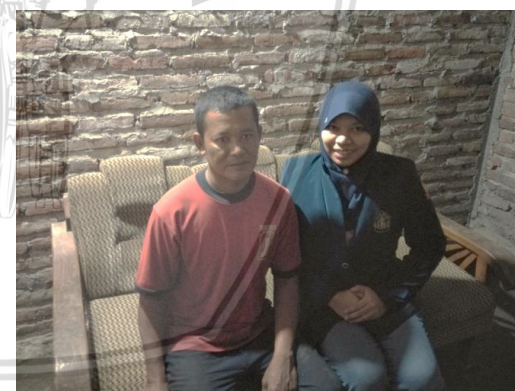
Lampiran 6. Dokumentasi

1. Dokumentasi Responden penelitian



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)

Dokumentasi Responden penelitian (Lanjutan)



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)

2. Dokumentasi Infrastruktur Kelurahan Warujayeng



Kantor Kecamatan Tanjunganom

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)



Kantor UPTD. Dinas Pertanian

Kecamatan Tanjunganom

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)



Gedung Pertemuan Penyuluhan UPTD. Dinas

Pertanian Kecamatan Tanjunganom

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)



Lahan Pertanian di Kelurahan Warujayeng

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)



Rumah Petani di Kelurahan Warujayeng

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)



Mesin Penggiling Bantuan Pemerintah

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017)